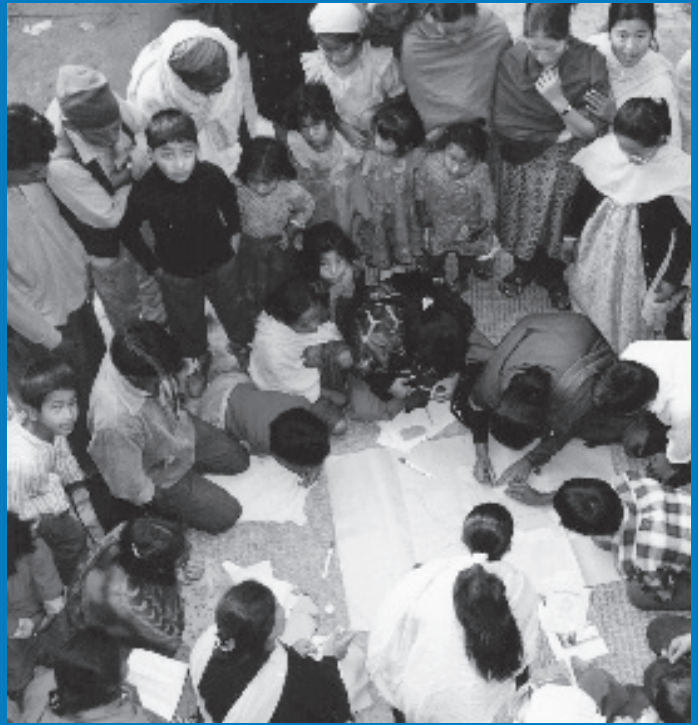


PANDUAN  
RINGKAS  
UNTUK  
PEMBUAT  
KEBIJAKAN



# Perumahan bagi kaum miskin di kota-kota Asia

 UNITED NATIONS  
**ESCAP**  
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  
 **UN HABITAT**  
FOR A BETTER URBAN FUTURE

# 6

**ORGANISASI BERBASIS  
KOMUNITAS:** Kaum miskin  
sebagai agen pembangunan

Hak cipta © United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan United Nations Human Settlements Programme, 2008

ISBN: 978-92-113-1945-3

HS/958/08E Housing the Poor in Asian Cities, Quick Guide 6

**PENAFIAN:**

Judul yang dipergunakan dan presentasi dari materi publikasi ini tidak menunjukkan pendapat apapun dari Sekretariat PBB mengingat status hukum dari negara, daerah cakupan, kota atau daerah pemerintahan, atau mengingat batasan mengenai sistem ekonomi atau tingkat pembangunan. Analisa, kesimpulan, dan rekomendasi dari publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari PBB atau anggota negaranya. Kutipan dapat direproduksi tanpa ijin, dengan catatan bahwa sumber harus disebutkan.

Desain muka oleh Tom Kerr, ACHR dan dicetak di Nairobi oleh kantor PBB di Nairobi

Foto muka oleh Asian Coalition for Housing Rights

Publikasi dari seri Perumahan bagi Kaum Miskin di kota-kota di Asia didukung secara finansial oleh pemerintah Belanda dan Rekening Pembangunan dari PBB.

**Dipublikasikan oleh:**

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Fax: (66-2) 288 1056/1097

E-mail: [escap-esdd-oc@un.org](mailto:escap-esdd-oc@un.org)

Web: [www.unescap.org](http://www.unescap.org)

dan

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)

P.O.Box 30030 GPO 00100, Nairobi, Kenya

Fax: (254-20) 7623092

E-mail: [tcbb@unhabitat.org](mailto:tcbb@unhabitat.org)

Web: [www.unhabitat.org](http://www.unhabitat.org)

Tim Penerjemah Awal edisi Bahasa Indonesia Versi 2009

Wicaksono Sarosa, Eveline, F.P. Anggriani Arifin, Savitri R. Soegijoko.

Tim Editor edisi Bahasa Indonesia Versi 2018

Nurul Wajah Mujahid, Ira Lubis, Marnia Nes, Melda Magiafitri,

Wicaksono Sarosa, Ardina Putri Rahtama, Yulia, Nurulitha A. Susetyo.

Pencetakan ulang buku ini dibiayai oleh National Slum Upgrading Project (KOTAKU)



**Catatan:**

Revisi penerjemahan buku Edisi 2018 ini telah mendapatkan persetujuan dari UNESCAP dan UN-HABITAT. Namun, penerjemahan ini bukanlah publikasi resmi dari kedua lembaga tersebut.

# **Perumahan bagi kaum miskin di kota-kota Asia**

## **6 ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS: Kaum miskin sebagai agen pembangunan**



**UN HABITAT**  
FOR A BETTER URBAN FUTURE



## Kata Pengantar

Perumahan yang layak merupakan salah satu hak dasar manusia yang diamanatkan dalam Pasal 28(H) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pemenuhannya masih belum mendapatkan dukungan optimal dari semua pihak sebagaimana kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Data statistik dari SUSENAS 2017 menunjukkan masih terdapat sekitar 63,2 % rumah tangga yang menempati hunian dengan minimal satu aspek ketidaklayakan dari empat indikator utama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Data ini menunjukkan bahwa standar kelayakan masih belum sepenuhnya diakses oleh seluruh masyarakat dengan berbagai sebab, dari mulai ketidakcukupan pengetahuan sampai kekurangan daya finansial, khususnya pada kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah terutama di perkotaan.

Buku Panduan Ringkas Kebijakan untuk Perumahan Kaum Miskin di Asia yang diterbitkan oleh UNESCAP pada tahun 2008 ini masih relevan dengan persoalan serupa di Indonesia dimana urbanisasi beserta segala konsekuensinya masih dominan mewarnai termasuk dalam isu perumahan dan kawasan permukiman. Kami merasa perlu untuk menerbitkan ulang buku panduan yang cukup lengkap dengan beberapa sub-tema yang terkait agar menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Buku yang diterbitkan ulang ini telah mengalami proses editorial terutama dalam menyempurnakan tata bahasa terjemahan dari edisi sebelumnya. Buku ini harapannya dapat mengisi ruang belajar untuk menangani persoalan dengan basis pembelajaran lapangan dari berbagai kota di Asia dengan harapan ke depan agar buku ini dapat dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai pembelajaran dari Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak UNESCAP yang sudah memberikan ijin untuk mencetak ulang panduan juga kepada Bapak Budi Yuwono yang telah berkenan memberikan kata pengantarnya dalam edisi lama. Semoga buku panduan ini dapat memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan dalam pemenuhan perumahan layak, aman dan terjangkau terutama dalam rangka mewujudkan Agenda Kota Tanpa Permukiman Kumuh sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.

Deputi Bidang Pengembangan Regional  
Kementerian PPN/BAPPENAS  
Rudy S. Prawiradinata  
Jakarta, Desember 2018

# Ucapan Terima Kasih

Tujuh seri Panduan Ringkas ini disiapkan sebagai hasil dari pertemuan kelompok ahli di bidang pengembangan kapasitas untuk perumahan bagi kaum miskin, diorganisasikan oleh UNESCAP di Thailand bulan Juli 2005. Panduan-panduan ini disiapkan melalui kerjasama antara Divisi Kemiskinan dan Pembangunan UNESCAP dan Cabang Pengembangan Kapasitas UN-HABITAT, dengan dana dari Rekening Pembangunan dari PBB dan Pemerintah Belanda di bawah proyek “Perumahan bagi Kaum Miskin dalam Ekonomi Kota” dan “Memperkuat Kemampuan Pelatihan Nasional untuk Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kota yang Lebih Baik”. Sejumlah poster yang memajang pesan utama dari masing-masing Panduan Ringkas dan sekumpulan modul pelatihan yang tersedia *on-line* juga disiapkan dengan kerjasama ini.

Panduan-panduan Ringkas ini diproduksi di bawah koordinasi Bapak Adnan Aliani dari Divisi Kemiskinan dan Pembangunan, UNESCAP dan Ibu Åsa Jonsson dari Cabang Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas, UNHABITAT, dengan dukungan dan masukan penting dari Bapak Yap Kioe Sheng, Bapak Raf Tuts dan Ibu Natalja Wehmer. Kontribusi dan penelaahan internal juga diberikan oleh Ibu Clarissa Augustinus, Bapak Jean-Yves Barcelo, Bapak Selman Erguden, Bapak Solomon Haile, Bapak Jan Meeuwissen, Bapak Rasmus Precht, Ibu Lowie Rosales, dan Bapak Xing Zhang.

Panduan-panduan disiapkan oleh Bapak Thomas A.Kerr dari Koalisi Asia untuk Hak atas Perumahan (Asian Coalition for Housing Rights – ACHR) berdasarkan dokumen yang disiapkan oleh Bapak Babar Mumtaz, Bapak Michael Mattingly dan Bapak Patrick Wakely, mantan pengajar di Development Planning Unit – DPU, University College of London; Bapak Yap Kioe Sheng dari UNESCAP; Bapak Aman Mehta dari Sinclair Knight Merz Consulting; Bapak Peter Swan dari Koalisi Hak terhadap Perumahan Asia (Asian Coalition for Housing Rights – ACHR) serta Bapak Koen Dewandeler dari King Mongkut Institute of Technology, Thailand.

Dokumen asli dan bahan lainnya dapat diakses di: [www.housing-the-urban-poor.net](http://www.housing-the-urban-poor.net).

Kontribusi di atas telah membentuk seri Panduan Ringkas, yang kami harap akan membantu pekerjaan sehari-hari para pembuat kebijakan di Asia dalam usaha meningkatkan perumahan bagi kaum miskin kota.

# Daftar isi

## KONDISI

Komunitas Miskin: Sumber daya yang belum termanfaatkan di kota-kota Asia .....	2
Sejarah panjang kemandirian .....	3
Organisasi komunitas: yang asli dan yang palsu .....	4
“Mengaduk banyak panci” .....	5

## KONSEP

Dari konfrontasi menuju negosiasi, dan dari pertahanan menuju kolaborasi .....	6
“Kami bisa bicara mewakili kami sendiri.” .....	7
Keikutsertaan komunitas: dari pemilikan penuh hingga manipulasi .....	8

## PENDEKATAN

Kemitraan: Bagaimana organisasi komunitas miskin membantu pemerintah menyelesaikan masalah lahan, perumahan, sarana dasar, dan kemiskinan .....	9
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam hal perumahan .....	10
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam pengalihan permukiman .....	12
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam perbaikan .....	14
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam pendanaan perumahan .....	16
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam hal sanitasi .....	18
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam infrastruktur .....	20
Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam rehabilitasi paska bencana .....	22

## ALAT & PANDUAN

6 alat yang digunakan komunitas untuk membangun organisasi mereka .....	24
Dana Pembangunan Komunitas .....	34
10 cara mendukung organisasi komunitas .....	36

## DAFTAR PUSTAKA

Buku, artikel, publikasi, dan situs web .....	37
---	----

*“Sangatlah penting bahwa dalam jangka panjang, komunitas miskin, sebagai kelompok utama pencari keadilan sosial, memiliki dan mengelola proses pembangunan mereka sendiri, dan menjadi pusat dalam penyempumaan dan perluasannya.”*

*Sheela Patel, SPARC, India.*



PHOTO: SPARC

## **Organisasi berbasis komunitas: Kaum miskin sebagai agen pembangunan**

### **PANDUAN RINGKAS UNTUK PEMBUAT KEBIJAKAN NO. 6**

Munculnya organisasi komunitas miskin di Asia merupakan perkembangan yang sangat penting pada dua dekade terakhir. Sebagai sistem sosial yang memungkinkan rumah tangga miskin dan komunitas miskin beralih dari isolasi dan ketidakberdayaan menuju kekuatan kolektif, organisasi semacam ini menjadi mekanisme yang efektif dalam pembangunan di negara mereka – dan dimiliki sepenuhnya oleh rakyat.

Selain menjadi sarana berbagi gagasan, wadah pengumpulan modal dan dukungan, organisasi komunitas menyediakan saluran bagi masyarakat miskin untuk bicara dengan pemerintah lokal maupun nasional. Selain itu, organisasi komunitas juga melaksanakan proyek pembangunan kolaboratif dalam bidang perumahan, perbaikan, pemilikan lahan, infrastruktur dan penghidupan. Banyak komunitas miskin Asia menyelenggarakan perumahan dan peningkatan komunitas, bekerja sama dengan pemangku-kepentingan pembangunan lain.

Organisasi komunitas dapat menjadi mitra berharga dan penuh sumber daya dalam mencari solusi perumahan yang terjangkau bagi kaum miskin. Organisasi komunitas harus memainkan peran utama dalam mencari solusi bagi masalah perumahan mereka. Sangat baik bila penyusun kebijakan mengerti perkembangan organisasi semacam ini, cara kerja, dan alat yang mereka gunakan, terutama dalam konteks peningkatan desentralisasi. Panduan ini memperkenalkan aspek-aspek tersebut dalam organisasi komunitas Asia.

Panduan Ringkas ini tidak hanya ditujukan untuk para ahli perumahan, namun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembaca, termasuk pembuat kebijakan, pemerintah pusat dan daerah, mengenai isu penyediaan perumahan untuk MBR.



PHOTO: UNESCAP

“Satu hal yang dapat kita petik setelah bertahun-tahun adalah tidak satupun dari gambaran kelam maupun kritik tidak membangun dapat membuat masyarakat dan pemerintah bertindak. Yang kita perlukan adalah visi positif, peta jalan yang jelas untuk berangkat dari sini menuju ke sana, dan tanggung jawab yang jelas yang diberikan pada masing-masing aktor dalam sistem tersebut.”

Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan

## Komunitas Miskin: Sumber daya yang belum dimanfaatkan di kota Asia

Kaum miskin kota adalah perancang, pembangun, dan pemasok perumahan terjangkau di kota Asia. Hal-hal yang puluhan tahun diusahakan oleh pemerintah, melalui program perumahan pemerintah, proyek pembangunan, kampanye hak perumahan, dan intervensi pembangunan internasional, bisa disediakan secara swadaya oleh mereka: yaitu rumah dan pelayanan dasar yang terjangkau di lokasi dan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan mereka – pada saat dibutuhkan, bukan di masa mendatang.

Sistem penyediaan perumahan dan sarana di permukiman ini memang belum ideal, kebanyakan “ilegal,” dan seringkali di bawah standar dalam berbagai aspek, namun permukiman ini adalah respon terhadap kebutuhan yang begitu mendesak, saat tiada alternatif lain. Bukti nyata kreativitas manusia ini memperlihatkan adanya kemandirian luar biasa dan vitalitas yang tumbuh, dan menjadi salah satu sumber energi besar dan belum dimanfaatkan di kota Asia.

Pemerintah selama ini cenderung melihat kawasan kumuh dan permukiman informal sebagai masalah serius yang harus ditangani, cela bagi kota, sumber anti keteraturan sosial,

atau sebagai bentuk penyimpangan perilaku masyarakat yang harus ditindak. Akan tetapi dua dekade terakhir, pemerintah dan pembuat kebijakan melihat kembali permukiman informal – dan komunitas miskin yang membangunnya – dan mengakui peran konstruktif komunitas ini (dan organisasinya) dalam menemukan solusi berkelanjutan skala besar bagi masalah kota di bidang lahan, perumahan, dan penghidupan.

Kebanyakan kota Asia memiliki sejarah panjang dan kelam mengenai kegagalan proyek perumahan: pembangunan perumahan sosial yang justru merumahkan kelompok berada, proyek uji coba yang tak pernah direplikasi dalam skala besar, dan proyek relokasi yang terbengkalai, hingga spekulasi.

Banyak pemerintah maupun kalangan profesional menyadari bahwa proyek *top-down* semacam ini, yang dirancang tanpa melibatkan kaum miskin, takkan menyelesaikan masalah yang terus berkembang. Mereka pun menyadari, saat organisasi komunitas miskin berada pada pusat perencanaan dan penerapan program perumahan dan pembangunan yang mempengaruhi mereka, program semacam ini memiliki kemungkinan berhasil lebih tinggi.

## Sejarah panjang kemandirian

Kemandirian merupakan dasar dari banyak aspek cara pembentukan komunitas urban, cara mereka mencari lahan untuk bermukim, cara membangun, membeli, atau menyewa rumah, mencari akses air bersih dan listrik, memperkeras jalan-jalan setapak yang becek, mendapatkan pinjaman saat darurat, menemukan pekerjaan, dan cara mereka bertahan hidup di kota yang hampir sama sekali tak menyediakan bantuan apapun. Permukiman miskin mungkin terlihat tidak beraturan bagi kalangan luar, padahal sebenarnya merupakan sebuah ruang bermukim yang kompleks dengan penduduk saling bergantung, saling membantu dan penuh kreativitas dari penduduknya.

Bila suatu komunitas informal mampu bertahan tanpa terganggu di tempat yang sama bertahun-tahun, kemungkinan besar komunitas tersebut akan perlahan memperbaiki keadaan dan berkonsolidasi: kondisi perumahan dan kehidupan akan meningkat, struktur pendukung akan semakin baik, dan sistem kolektif untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah dalam komunitas akan semakin kuat. Banyak komunitas membangun kapasitas yang

tidak main-main dalam menata diri, berkolaborasi dengan organisasi lain, dan membangun hubungan pragmatis dengan politikus lokal atau badan pemerintah untuk memperoleh hal yang dibutuhkan permukiman mereka. Inilah awal mula organisasi komunitas, namun pelaksanaannya memang tidak pernah mudah.

Kebanyakan organisasi komunitas yang muncul tahun 60 dan 70-an terbentuk tanpa intervensi atau dukungan kewenangan lokal ataupun badan pemerintah. Sebaliknya, kebanyakan kewenangan lokal enggan bernegosiasi dengan organisasi komunitas, karena kolaborasi resmi dengan penghuni “ilegal” suatu lahan akan terkesan memberi legitimasi bagi mereka. Pada masa itu, tak banyak badan pemerintah lokal maupun nasional mau menawarkan bantuan bagi atau bekerja sama dengan komunitas miskin dengan menerapkan berbagai inisiatif pembangunan sosial maupun fisik.

Akibatnya, permukiman ini dibiarkan. Bila ada perbaikan pada perumahan atau lingkungan mereka, biasanya dilakukan oleh komunitas itu sendiri, tanpa tersentuh program yang ada maupun rencana kerja pemerintah bidang perumahan.



PHOTO: LUMANTI

*Sepanjang sejarah dunia, manusia telah menata diri sedemikian rupa dalam komunitas, untuk bertahan hidup, dan untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan yang tak dapat ditemukan secara individu: kebutuhan fisik, emosi, ekonomi, keamanan, dan budaya. Kemandirian kolektif ini masih hidup hingga kini di komunitas miskin perkotaan Asia.*



## Partisipasi komunitas yang asli:

*Bila penyelenggara proyek dapat mengadopsi rancangan dan strategi yang terbuka dan fleksibel dalam seluruh aspek proyek pembangunan, bahkan organisasi komunitas yang baru terbentuk sekalipun dapat tumbuh bersamaan dengan proyek, dan keluarannya hampir pasti akan lebih tepat guna secara fisik dan lebih berkelanjutan secara sosial.*

## Organisasi komunitas: yang asli dan yang palsu

Setelah terjadi beberapa kisah sukses yang melibatkan terobosan dalam hal kemitraan pemerintah dan masyarakat di tahun 70-an dan 80-an, istilah 'Partisipasi Masyarakat' menjadi kata yang populer. Semakin banyak proyek pembangunan di Asia dirancang dengan prasyarat bahwa organisasi komunitas harus menjadi mitra proyek. Namun, dengan banyaknya proyek semacam ini, banyak organisasi komunitas yang dibentuk dengan terburu-buru sehingga belum siap untuk bermitra.

Dalam berbagai kesempatan, organisasi komunitas yang baru dibentuk ini ternyata sangat lemah karena tujuan pembentukan satu-satunya adalah memenuhi aturan proyek, atau menjamin bahwa anggota komunitas ikut bergotong royong secara finansial maupun fisik. Organisasi komunitas semacam ini merupakan tempelan dadakan pada proyek yang dilahirkan dan diterapkan tanpa melibatkan komunitas secara nyata, karenanya kebanyakan proyek ini gagal. Saat terjadi kegagalan, umumnya komunitas penghunilah yang disalahkan.

Dalam banyak proyek *top-down* semacam ini, para pejabat pemerintah dan profesional pendukung

yang menjalankan proses tak memiliki ketertarikan nyata untuk mengerti atau melibatkan diri dengan komunitas, atau membangun kapasitas mereka melalui proses perancangan proyek, perencanaan, dan penerapan. Partisipasi organisasi komunitas karbitan semacam ini terbatas pada mencap stempel program penyediaan perumahan konvensional yang telah disusun jauh sebelumnya, yang diharapkan bisa berjalan tanpa perubahan berarti untuk mengakomodasi prioritas, kebutuhan, atau kapasitas finansial penghuninya. Inilah cara terbaik untuk menjamin organisasi komunitas takkan berkembang.

Organisasi komunitas yang sungguh berdasar pada perjuangan bersama memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dapat dimulai dengan berbagai cara. Bisa saja lahir spontan, atau muncul dari perjuangan melawan penggusuran. Bahkan bisa saja organisasi ini dimulai melalui intervensi LSM atau proyek pembangunan besar. Kemungkinannya bertumbuh menjadi organisasi sesungguhnya atau mandeg pada status organisasi boneka tanpa isi maupun daya, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat di dalamnya.

## “Memenuhi berbagai kebutuhan”

**Banyak organisasi komunitas belajar bahwa kunci keberlangsungan gerakan mereka adalah kerja di berbagai lini dan melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan**

Perubahan nyata tak berlangsung semalam. Bisa jadi perlu waktu sangat lama. Seringkali hal ini tidak disadari oleh kebanyakan program pembangunan dan perumahan formal. Mencari solusi yang berkelanjutan memerlukan kesabaran dan semangat yang tak kunjung padam bagi sebuah organisasi komunitas. Mereka menginginkan adanya perubahan dan hal ini tak mungkin tercapai sebelum mereka memiliki bukti terukur bahwa perubahan itu mungkin.

Di masa lalu, banyak organisasi komunitas yang baik terbentuk dan bertumbuh kuat dalam kesatuan (misalnya pengusuran), namun kemudian melemah saat masalah telah terpecahkan. Bila organisasi komunitas hanya bergantung pada satu isu, satu krisis, atau satu proyek percontohan untuk menjaga kelangsungan proses pergerakannya, yang muncul hanyalah tekanan untuk menyelesaikan isu atau proyek. Saat orang mulai putus asa, organisasi akan runtuh. Organisasi komunitas yang sehat dan kuat butuh waktu untuk berkembang, dan berkembang terbaik saat terus sibuk melayani berbagai kebutuhan pada berbagai lini dengan berbagai cara – dalam waktu bersamaan.

Sheela Patel, dengan LSM India SPARC, menggambarkan aktivitas berbagai lini ini sebagai “mengaduk banyak panci.” Saat kita menunggu satu panci masak, panci lain mungkin sudah mendidih, siap diangkat. Selalu ada sesuatu yang siap untuk menjaga semangat dan antusiasme,

walau panci lain mungkin masih dingin. Ini sangat berbeda dari melakukan satu hal dengan hati-hati hingga sempurna, lalu mereplikasinya. Saat panci besar dan kecil di berbagai tempat meletup-letup di kompor-kompor terpisah, menjaga panci membantu menciptakan momentum untuk menjaga organisasi komunitas bertumbuh dan aktif.

Mengaduk banyak panci berarti mengakomodasi perbedaan kebutuhan dalam komunitas miskin manapun, saat pria, wanita, anak-anak, remaja, dan lansia mungkin, misalnya, memiliki kebutuhan dan tingkat kemiskinan berbeda. Semakin banyak kegiatan, semakin luas ruang yang tercipta untuk melahirkan pemimpin baru, melibatkan orang-orang baru dalam karya yang mereka jiwai, dan menyebarkan daya dalam komunitas kepada banyak orang – melalui keterlibatan aktif. Saat mereka membuka kesempatan bagi banyak orang untuk terlibat, berbagai kegiatan ini juga menyediakan kesempatan melepaskan tekanan dan frustrasi, yang selalu hadir dalam situasi kemiskinan.



PHOTO: IUDIC - MONGOLIA

*Gerakan komunitas yang lahir dari perjuangan melawan penggusuran telah mengubah diri menjadi pemimpin pro-aktif dalam mencari solusi bagi masalah perumahan di kota mereka.*



## Dari konfrontasi menuju negosiasi, dan dari perlawanan menuju kolaborasi

Kebanyakan gerakan komunitas perkotaan Asia lahir saat melawan penggusuran. Ancaman penggusuran telah mendesak kelompok-kelompok miskin untuk bersatu dan menata diri untuk melindungi permukiman mereka. Fokus pada krisis bersama ini telah membantu meningkatkan kesadaran akan kesulitan bersama mereka sebagai penghuni ilegal lahan orang lain, dan kebutuhan bersama akan perumahan yang layak dan aman. Perjuangan untuk mempertahankan rumah dan kehidupan melawan penggusuran mengakibatkan banyak hal terjadi pada komunitas miskin:

**1 Perjuangan ini mendorong orang lebih mengerti kota** yang meminggirkan mereka, sistem hukum yang menganggap mereka kriminal, dan hak perumahan yang disangkal dari mereka.

**2 Perjuangan ini membuat anggota komunitas terhubung dengan jaringan** yang meliputi orang-orang dan organisasi yang bersimpati terhadap perjuangan mereka.

**3 Perjuangan ini membantu masyarakat mengembangkan struktur pengambilan keputusan efektif** dan memunculkan kepemimpinan yang mampu dan bertanggung jawab dalam organisasi komunitas mereka.

**4 Perjuangan ini membantu membangun kepercayaan,** komitmen, sistem pengambilan keputusan yang demokratis, dan kerja sama antara anggota komunitas.

Kesemuanya berarti organisasi komunitas yang lebih kuat, canggih, siap melakukan kampanye kreatif dan negosiasi efektif dengan pemerintah yang seringkali menggusur mereka.

Sesuatu yang berawal dari respon untuk bertahan dalam jangka pendek bagi komunitas yang terpinggirkan, secara bertahap berubah menjadi proses proaktif yang berfokus pada perumahan yang terjamin dalam jangka panjang melalui proses persiapan, dialog dan negosiasi.

Walau penggusuran tetap terjadi dan masyarakat miskin terus tersingkir, perjuangan panjang dan sulit melawan penggusuran akhirnya menghasilkan beberapa dobrakan besar dalam pemilikan lahan dan perumahan kaum miskin. Hal ini menunjukkan pada pemerintah lokal dan komunitas bahwa kerja sama (dibandingkan dengan saling lawan) dapat menghasilkan solusi perumahan yang bertahan lama dan baik untuk semua: bagi kaum miskin dan kota tempat mereka mengambil bagian.

## “Berdirilah di belakang kami, bukan di depan. Kami bisa bicara mewakili diri sendiri.”

LSM dapat menjadi mitra strategis bagi organisasi masyarakat dengan memberikan dukungan melalui berbagai cara. LSM juga bisa menjadi penghubung yang berarti antara sistem formal dan kenyataan, akal sehat dan kebingungan yang meliputi kehidupan masyarakat miskin. Namun pesan dari organisasi komunitas yang kuat terhadap mitra LSM mereka adalah seperti ini: *“Kami bisa bicara mewakili diri kami sendiri. Berdirilah di belakang, bukan di depan kami. Yang penting adalah penguatan proses masyarakat, bukan manipulasi terhadapnya atau penciptaan ketergantungan.”*

LSM berperan besar dalam membantu komunitas miskin di banyak negara Asia menata diri menjadi organisasi swakelola dengan kapasitas dan skala yang cukup untuk menghadapi berbagai masalah, mulai dari lahan, rumah, akses terhadap sarana dasar, hingga isu kesehatan dan kesejahteraan dan peluang kerja yang lebih baik. Memang masih ada beberapa negara yang menganggap

organisasi komunitas otonom (beserta LSM pendukungnya) sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, sehingga dijaga dengan ketat, namun di kebanyakan negara Asia, LSM telah meraih kebebasan untuk bermitra dengan organisasi komunitas, dan kemitraan ini menghasilkan beberapa solusi yang merupakan terobosan terhadap permasalahan perumahan perkotaan dan kemiskinan (*dibahas lebih lanjut pada bagian “Kemitraan” di panduan ini*).

Dalam dua dekade terakhir, LSM semakin diterima sebagai aktor kunci dalam kemitraan baru yang memungkinkan pemerintah dan pejabat lokal berdialog dan bekerja sama dengan organisasi komunitas dalam isu pengentasan kemiskinan, perumahan, dan sarana dasar. Namun, sangat penting bagi LSM untuk menahan kebiasaan mendominasi atau bicara mengatasnamakan mitra komunitas mereka – dan ini tidak selalu mudah dilakukan.

### Satu-satunya hal yang pasti:

*Proyek datang dan pergi, LSM angkat kaki atau berganti fokus, hibah donor mengering, paradigma pembangunan memasuki dan meninggalkan trend, kaum profesional berjalan terus, pemerintah berganti dan birokrat berpindah. Derajat perubahan dalam dunia pembangunan sangatlah tidak tetap, inilah kenyataannya. Satu-satunya hal yang tetap adalah komunitas miskin itu sendiri. Setelah jutaan dana habis dan para konsultan pulang, orang-orang akan tetap membutuhkan tempat yang aman untuk hidup, pekerjaan, kakus, dan keran air.*

Sumber: ACHR



PHOTO: UNHABITAT

## Keikutsertaan komunitas: dari pemilikan penuh hingga manipulasi

Ada berbagai cara bagi komunitas untuk ikut serta dalam proses pemecahan masalah lahan, perumahan, penghidupan, dan akses terhadap sarana dasar. Sebagai pihak yang mengalami masalah, mereka paling mengerti dan bermotivasi kuat untuk menyelesaikannya. Terlepas dari itu, banyak LSM, organisasi pembangunan, dan badan pemerintah tidak secara penuh berkonsultasi pada mereka dan berupaya menerapkan gagasan sendiri melalui proyek dan program, dengan keikutsertaan komunitas hanya secara tidak signifikan. Sama halnya dengan demokrasi perwakilan yang tak selalu menjamin keikutsertaan penuh dengan ruang yang cukup bagi pemimpin pilihan lokal untuk berkonsultasi dengan komunitas. Keikutsertaan komunitas dapat mengambil berbagai bentuk:

**1 Keikutsertaan dengan pemilikan penuh:** Komunitas mengendalikan pengambilan keputusan, sementara pemerintah melakukan inisiatif atas permintaan komunitas. Dalam bentuk keikutsertaan ini, pemerintah merespon dan mendukung, bukan memimpin proses, sementara komunitas mengelola, menerapkan, dan mengendalikan inisiatif yang mereka rancang sendiri, menurut kebutuhan dan prioritas yang telah mereka identifikasi.

**2 Keikutsertaan melalui kerja sama:** Di sini, pemerintah dan komunitas bekerja sama menuju tujuan bersama, dengan pengambilan keputusan komunitas yang kuat, seringkali difasilitasi oleh LSM. Komunitas terlibat dari tahap awal, dan kelompok rentan dalam komunitas (umumnya perempuan) didorong untuk mengambil bagian.

**3 Keikutsertaan melalui konsultasi:** Keikutsertaan komunitas dicari dengan maksud baik, biasanya oleh forum penyelenggara yang memberi kesempatan masyarakat untuk berbagi pandangan mengenai intervensi terencana. Walau pengambilan keputusan dan informasi dikendalikan badan luar, proyek dapat diadaptasi dalam proses agar lebih sesuai kebutuhan lokal, berdasarkan yang muncul dalam forum. Komunitas mungkin tak memiliki banyak kendali, namun setidaknya dapat menyuarakan pendapat sehingga proyek memiliki sedikitnya akuntabilitas.

**4 Keikutsertaan melalui informasi:** Ini mungkin terlihat sebagai keikutsertaan komunitas, namun sesungguhnya mereka hanya mendapat informasi tentang hal yang akan terjadi, tanpa peduli suka atau tidak. Masyarakat tak memiliki ruang mengungkapkan pendapat atau memengaruhi perubahan, dan proses biasanya tak transparan. Tujuan “keikutsertaan” semacam ini biasanya untuk mengurangi potensi perlawanan terhadap proyek (misal melepaskan lahan komunitas untuk pelebaran jalan).

**5 Keikutsertaan melalui manipulasi:** Dalam bentuk keikutsertaan ini, komunitas hanya disertakan untuk alasan eksploitatif. Tak ada pengambilan keputusan partisipatif. Komunitas hanya digunakan untuk tujuan politis, tenaga kerja gratis, pengembalian biaya, atau memenuhi syarat donor.

*Sumber: Adaptasi dari Plummer, 2000*

## Kemitraan: 7 cara organisasi komunitas miskin membantu pemerintah menyelesaikan masalah lahan, perumahan, sarana dasar, dan kemiskinan di kota-kota Asia

Masalah lahan, perumahan, dan sarana di kota-kota Asia terlalu besar dan rumit untuk komunitas, pemerintah, kota ataupun badan pembangunan secara sendiri-sendiri. Solusi terbaik yang mencapai skala kebutuhannya mensyaratkan kemitraan, namun ini tak mudah, terutama antara kaum miskin dan negara, yang memiliki sejarah panjang saling tidak percaya.

Salah satu prinsip kemitraan yang baik adalah mencari cara agar tiap pihak dapat melakukan hal terbaik yang ia bisa, dan membiarkan masing-masing melakukan yang terbaik, sehingga tiap pihak akan menyumbang pada keseluruhan karya. Pemecahan semacam ini memiliki banyak sisi dan menjadi solusi terbaik bagi beberapa pihak, namun kemitraan makan waktu, dan hanya dapat dibangun melalui praktek.

Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat miskin lebih baik dan efisien tinimbang negara. Komunitas informal memiliki berbagai keahlian yang diperlukan untuk membangun kota: tukang batu, tukang kayu, tukang pipa, tukang listrik, buruh. Tambahkan kepercayaan diri, keterampilan, skala, inovasi, dan kapasitas organisasi yang telah dibangun oleh organisasi komunitas Asia, disempurnakan, dan diperbesar dalam dua dekade terakhir, maka kita memiliki

sumber daya luar biasa dan siap pakai untuk memecahkan masalah. Bila keterampilan yang tertampung dalam organisasi komunitas dapat membangun kota, ini juga dapat disalurkan untuk meningkatkan kehidupan sejumlah besar populasi di kota-kota Asia yang tertinggal.

Kemitraan antara badan pemerintah dan komunitas miskin memang baru. Seiring perlunya badan pemerintah menapak mundur dan melakukan hanya hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh komunitas dan masyarakat sendiri, perlu juga penyesuaian sikap administratif maupun pola pikir masing-masing pihak. Kemitraan jenis ini, dan pemindahan kendali yang terkandung dalamnya, mewakili strategi bagi pemerintah untuk mencapai desentralisasi sesungguhnya dan keikutsertaan penuh masyarakat miskin dalam program yang memengaruhi kehidupan mereka.

Di banyak kota Asia, organisasi komunitas miskin terlibat dalam inisiatif kemitraan skala besar dengan kota mereka dan aktor lain, untuk menemukan solusi efektif, jangka panjang, dan dapat direplikasi. Keluaran dari kemitraan ini mencakup beberapa karya paling inovatif dan menarik dalam pembangunan masa kini. Proyek seperti ini menunjukkan bahwa kota dan komunitas miskin bisa bekerja sama, dan akan lebih baik bagi semua orang saat semua bekerja sama.

### Masalah kaum miskin adalah masalah keseluruhan kota

Ini bukan melulu masalah keadilan, atau hak, melainkan masalah dasar kesetimbangan perkotaan. Semua bagian kota sesungguhnya saling terkait. Bila infrastruktur kota, misalnya, memungkinkan kotoran dan sampah dari sebagian populasi kota membanjiri sungai tanpa melalui pengolahan, ini bukan hanya kabar buruk bagi kaum miskin yang tak terlayani, melainkan merugikan bagi kota secara keseluruhan. Saat kita merencanakan lahan, perumahan, dan sarana dasar bagi masyarakat miskin, ini menjadi kabar baik bagi keseluruhan kota.

Sumber: ACHR

# Kemitraan dalam praktek:

## 1

## Kemitraan dengan organisasi komunitas dalam hal perumahan

Kota Phnom Penh, Kamboja, bisa menjadi contoh bagus kemitraan antara komunitas miskin yang tertata dengan pemerintah distrik, kota, dan nasional (dengan dukungan UPDF, dana pembangunan komunitas lokal), yang mampu menciptakan kesempatan menyediakan perumahan layak dan aman bagi warga kota yang termiskin – melawan konteks penggusuran sebagai satu-satunya strategi perumahan.

Sangat sulit membayangkan konteks yang lebih sulit daripada keadaan saat kemitraan ini baru muncul. Perang puluhan tahun, kericuhan politik dan kesulitan yang tak terungkap telah mencabik komunitas di Kamboja, menceraikan masyarakat di seluruh negeri dan mengaburkan hubungan dengan masa lampau. Saat negara ini tertatih berdiri dan dana mengucur bagi pertumbuhan ekonominya, pendatang miskin dari desa tertarik ke kota mencari kerja di pabrik, tapak konstruksi, dan bidang jasa dan pariwisata yang mulai berkembang.

Bagi kaum miskin, Phnom Penh merupakan kota harapan dan peluang, namun saat harus menemukan tempat hidup yang layak dan terjangkau, kebanyakan tak mempunyai pilihan selain gubuk di sekitar 550 lebih permukiman informal kota, pada lahan terbuka, dan sepanjang jalan, rel kereta, kanal, ataupun sungai, dengan kondisi tak sehat dan tak aman. Saat kota berkembang, tekanan terhadap lahan perkotaan semakin memicu konflik antara komunitas miskin dan kepentingan komersial – mengakibatkan penggusuran skala sangat besar.



PHOTO: ACHR

Kamboja, tak seperti tetangganya Thailand dan Vietnam, belum memiliki sistem pendukung bagi kaum miskin: tak ada dewan perumahan, kementerian perumahan, mekanisme legislatif untuk mengesahkan permukiman informal, maupun program pemerintah untuk menyediakan sarana dasar atau mendukung upaya masyarakat meningkatkan kondisi permukiman mereka. Hampir tak ada dana perumahan bagi sektor manapun – kaum miskin maupun kelas menengah. Dan kota yang telah banyak terbebani tantangan seperti pengendalian banjir, kriminalitas, dan pembangunan ekonomi, kesulitan merespon kebutuhan populasi miskin kota yang meningkat.

Sejak 1998, jaringan kelompok simpan pinjam miskin perkotaan bekerja dengan pejabat distrik dan desa mengembangkan proyek perbaikan perumahan dan permukiman bagi hampir sepertiga komunitas miskin kota. Dengan pinjaman perumahan ringan dan hibah perbaikan UPDF, komunitas ini merencanakan, membangun, mengelola, dan membayar 3.000 rumah di 108 komunitas – semua dalam sebuah kota yang tak menawarkan pilihan lain bagi perumahan masyarakat miskin. *Sumber: UPDF/ACHR*

# Kemitraan perumahan di Phnom Penh, Kamboja

- Masyarakat merancang dan membangun rumah dan permukiman mereka
- Kota dan perdana menteri membayar lahan baru
- UPDF menyediakan pinjaman lunak perumahan dan subsidi infrastruktur

Selama 15 tahun komunitas rumah tangga miskin menempati lahan secara ilegal pada lahan di Prek Toel, bersebelahan dengan pembuangan sampah Phnom Penh di Distrik Mean Cheay. Kebanyakan anggota masyarakat memperoleh penghasilan dari memulung, memilah, dan menjual sampah daur ulang dari tumpukan buangan (anak-anak pun ikut bekerja) dan mendapatkan 1-2 US\$ per hari. Kondisi hidup buruk: tak ada kakus, drainase ataupun jalan, dan banjir kerap menghadang. Saat komunitas ini harus digusur tahun 2003, jaringan komunitas Phnom Penh membantu membangun kelompok simpan pinjam harian dan mulai mencari lahan di sekitar yang akhirnya dapat mereka beli. Melalui jaringan simpan pinjam, kota mendengar kasus tersebut dan setuju mendukung upaya perumahan swadaya masyarakat dan membeli lahan dekat lokasi untuk pemindahan permukiman, sesuai dengan pilihan masyarakat.

**1 LAHAN:** Masyarakat menemukan lahan 2 hektar bekas pabrik sekitar 2 km dari lokasi. Selain lahan, mereka juga mendapatkan bangunan pabrik tua, yang digunakan untuk pra-sekolah dan pusat komunitas. Lahan senilai 120.000 US\$ dibayar oleh perdana Menteri sebesar 40.000 US\$ dan kota sebesar 80.000 US\$. Keseluruhan 159 rumah tangga (826 penduduk) berpindah ke lahan baru Juli 2003. Masyarakat mendapatkan sertifikat tanah pribadi setelah tinggal di sana selama 5 tahun.



PHOTO: UNESCAP

**2 RANCANGAN PERMUKIMAN:** Dengan bantuan arsitek muda di UPDF, para penghuni membangun tatanan permukiman dengan halaman bermain, pusat komunitas, bengkel daur ulang sampah kolektif, dan 159 kapling rumah (masing-masing 72 m<sup>2</sup>), untuk pemukiman 116 rumah tangga dari Prek Toel, dan 43 rumah tangga lain yang baru tergusur di daerah sekitarnya.

**3 RUMAH:** 59 rumah tangga mengambil pinjaman perumahan dari UPDF sekitar 200-500 US\$, yang dicicil bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan pola pendapatan mereka. Yang lain membangun rumah menggunakan bahan seperti kayu bekas dan lembaran logam dari rumah lama mereka, dan memperbaikinya secara bertahap.

**4 INFRASTRUKTUR:** Dengan hibah ringan dari UPDF dan UN-HABITAT, para penghuni membangun 866 m jalan setapak batu, 2 saluran drainase, pusat jahit-menjahit, dan beberapa kakus bersama. Keran air bersama disediakan oleh kota. Langkah selanjutnya bagi penghuni adalah mengecor jalan dan menanam pohon.

Sumber: [www.achr.net](http://www.achr.net)

# 2

## Kemitraan dalam hal pemukiman kembali

Pemukiman kembali sekian ribu rumah tangga untuk membebaskan lahan perluasan rel kereta di Metro Manila menjadi contoh bagus pengalihan permukiman tanpa kericuhan di kaum miskin, dengan organisasi komunitas sebagai mitra kunci dalam prosesnya.

Tahun 1997 pemerintah mencanangkan mega-proyek perluasan dan peningkatan rel kereta Manila untuk transportasi dan kargo. Gagasan ini disambut baik di tengah kondisi kota penuh kemacetan dan polusi. Proyek ini butuh lahan sepanjang 15 meter rel, dan 80.000 rumah tangga di permukiman kumuh sepanjang rel terancam pengusuran.

Asian Development Bank semula akan memberikan pinjaman bagi pemerintah Filipina untuk proyek ini, namun mundur karena pengalihan permukiman bagi semua rumah tangga secara layak memakan biaya begitu besar dan membuat proyek ini mustahil. Suatu konsorsium pemerintah Cina (tanpa pedoman pengalihan permukiman yang ketat) lalu maju untuk menyokong pendanaan.

Proyek ini semestinya menyediakan relokasi “dalam kota” bagi rumah tangga yang terkena

proyek di selatan dan utara, sehingga orang tak berpindah terlalu jauh. Karena Perusahaan Kereta Api Nasional Filipina merupakan badan usaha milik negara, relokasi rumah tangga yang terkena proyek tak menjadi tanggung jawabnya. Walau Kewenangan Perumahan Nasional mengawasi proses pemindahan permukiman, tiap kota yang dilintasi rel kereta (dengan kebijakan dan politiknya masing-masing) bertanggung jawab atas relokasi dalam batas daerah masing-masing.

Pemukiman kembali memberi bagi tiap orang:

- **Petak lahan matang** (40 m<sup>2</sup>) dengan harga subsidi 2.200 US\$, meliputi biaya pembangunan jalan beton, saluran drainase, jaringan listrik, dan pasokan air untuk daerah baru.
- **Bahan bangunan** senilai 870 US\$ plus 220 US\$ untuk tenaga kerja.
- **Pinjaman:** Lahan matang, bahan bangunan, dan anggaran tenaga kerja diberikan dengan dasar pengembalian biaya. Jumlah total 3.290 US\$ harus dikembalikan lewat cicilan bulanan selama 30 tahun dengan bunga tahunan 6%.

### Permukiman kumuh rel:

Sekitar 200.000 rumah tangga miskin hidup di permukiman informal sepanjang rel kereta api di Metro Manila, dengan berbagai aspek kehidupan mereka lekat dengan kereta. Siapapun tak bisa memilih hidup dalam situasi demikian berbahaya, namun karena kurangnya pilihan perumahan terjangkau, permukiman kumuh rel kereta tetap ada selama puluhan tahun.



PHOTO: PACSI - PHILIPPINES



*"Bila kami berhasil membuat satu program relokasi dengan satu kota, kami dapat menggunakannya untuk memengaruhi kota lain yang tak memiliki rencana relokasi. Ini seperti proyek percontohan kerja sama relokasi. Di beberapa kota orang-orang bahkan tak tahu apa yang tengah terjadi! Namun kini masyarakat dari Kota Bocaue bergerak ke permukiman rel kereta di kota-kota lain sepanjang jalur dan memberitakan hal yang terjadi. Dengan cara ini, rumah tangga yang terkena proyek akan membantu rumah tangga lain yang juga terkena, menyebarkan informasi dan membangun jaringan melalui proses ini."*

*Ruby Papeleras, HPFP*

## Kemitraan pengalihan permukiman Manila, Filipina

**Federasi Masyarakat Tunawisma Filipina (The Homeless Peoples Federation Philippines, HPFP)** merupakan jaringan nasional komunitas miskin perkotaan yang mempromosikan inisiatif komunitas dalam hal lahan, naungan, sarana dasar, penghidupan, dan proses pembangunan perkotaan yang melibatkan pemindahan permukiman kumuh yang rentan. Bertahun-tahun federasi ini mendukung kelompok simpan pinjam di permukiman sepanjang rel kereta api selatan di Mutinlupa, dan sejak tahun 2003 bekerja intensif dengan permukiman rel yang terkena proyek di keenam kota dalam proyek Rel Utara.

Bagi federasi ini krisis penggusuran dan bencana alam seringkali menjadi peluang emas untuk menggerakkan komunitas miskin berinisiatif merencanakan masa depan yang lebih baik dan aman. Pemindahan paksa ribuan rumah tangga pada proyek North Rail berpeluang untuk mengubah pemukiman kembali yang memiskinkan menjadi relokasi

berbasis komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan langkah awal dalam proses awal pembangunan berbasis komunitas yang komprehensif dan jangka panjang.

Di tiga kota permukiman rel kereta telah memiliki koalisi yang kuat, koalisi inilah yang meminta bantuan HPFP. Setelah membantu komunitas rel kereta di tiga kota membangun skema tabungan dan melakukan survei rumah tangga secara rinci di permukiman terkena proyek, mereka mendukung komunitas memulai dialog dengan pemerintah lokal mengenai syarat pemindahan dan pemilihan tapak baru "dalam kota." Mereka pun membangun penampungan sumber daya di semua kota, menyelenggarakan kunjungan pertukaran, dan mengajak para pemimpin komunitas mendatangi Payata terdekat untuk mengikuti pelatihan 4 hari yang diselenggarakan komunitas miskin mengenai tabungan dan perencanaan permukiman kembali.

*Sumber: [www.achr.net](http://www.achr.net)*



PHOTO: ACHR

### Menangkap energi yang ada:

*Pelaksanaan program perbaikan dengan skala Baan Mankong hanya mungkin dilakukan dengan jaringan komunitas aktif di kebanyakan kota di Thailand, yang siap memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan program ini. Program ini mewakili perbesaran skala dan formalisasi dari kerja keras jaringan selama sepuluh tahun ke belakang. Baan Mankong menawarkan kesempatan untuk menangkap dan mengendalikan energi yang ada dan membuat komunitas miskin menjadi agen perubahan, bukan sekedar penerima pasif manfaat pembangunan.*

## 3

## Kemitraan dalam hal perbaikan

Salah satu contoh terbaik Asia dalam kemitraan komunitas dan pemerintah adalah Program Perbaikan Baan Mankong Thailand, yang menempatkan komunitas permukiman kumuh (plus jaringannya) sebagai pusat proses pembangunan solusi jangka panjang menyeluruh untuk masalah lahan dan perumahan di 200 kota di Thailand.

Program perbaikan komunitas pertama yang dilakukan Badan Otoritas Perumahan Nasional berawal tahun 1977 dan merupakan upaya pertama pemerintah Thailand untuk memberikan sarana dasar bagi permukiman kumuh yang ada, tanpa melihat status pemilikan mereka. Ini adalah terobosan, yang menunjukkan semakin diterimanya gagasan bahwa membiarkan masyarakat tinggal di tempatnya mungkin akan lebih baik daripada penggusuran, seandainya perbaikan dapat dilakukan pada permukiman tersebut. Akan tetapi program perbaikan awal ini dihantui oleh masalah pengembalian biaya yang sulit, pengelolaan, dan kualitas. Pendekatan *top-down* yang mahal, yang menempatkan satu organisasi pemerintah sebagai pekerja, tak mampu bahkan sekedar untuk mendekati skala kebutuhan yang ada.

Tahun 2003, Pemerintah Thailand mengumumkan kebijakan ambisius untuk mengatasi masalah perumahan warga miskin perkotaan. **Program Perbaikan Baan Mankong** menyalurkan dana pemerintah, berupa subsidi infrastruktur dan pinjaman lunak perumahan, langsung ke komunitas miskin. Mereka merencanakan dan melaksanakan perbaikan perumahan, lingkungan, dan sarana dasar, dan mengelola anggaran tersebut sendiri. Alih-alih melayani perumahan rumah tangga miskin satu-persatu, Baan Mankong membiarkan komunitas mengerjakannya.

Sebagai bagian program tidak konvensional yang diterapkan Community Organizations Development Institute (CODI), komunitas miskin di 200 kota Thailand menjalin kerja sama erat dengan pemerintah lokal, kalangan profesional, universitas, dan LSM untuk melakukan survei semua permukiman di kota mereka dan merencanakan proses perbaikan dalam waktu 5 tahun. Saat rencana skala kota ini telah final, CODI menyalurkan anggaran (baik subsidi infrastruktur maupun pinjaman perumahan) dari pemerintah pusat langsung menuju komunitas.

## Kemitraan perbaikan di Bangkok, Thailand

Sekitar 3800 rumah tangga miskin hidup di 12 permukiman kumuh sepanjang Kanal Bang Bua Bangkok. Setelah berabad-abad dihantui resiko harian kebakaran, penggusuran, dan tuduhan mencemari kanal, masyarakat sepanjang kanal Bang Bua bergandeng dengan Program Baan Mankong memperbaiki komunitas mereka dan mengupayakan pemilikan lahan.

Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah setempat, universitas dan CODI, keseluruhan 12 komunitas Bang Bua membentuk jaringan, memulai kelompok simpan pinjam, koperasi, dan menyiapkan rencana pembangunan kembali permukiman mereka dan revitalisasi kanal. Komunitas telah menjadi mitra kota dalam merevitalisasi kanal ini.

Dengan dukungan jaringan kota 200 komunitas tepi kanal Bangkok, Bang Bua melakukan negosiasi sewa jangka panjang lahan publik yang mereka tempati. Bang Bua meyakinkan pemerintah, pembangunan kembali komunitas di tempat sama akan

berdampak baik bagi penghuni maupun keseluruhan kota. Setelah negosiasi panjang, pada penghuni mengajukan sewa bulanan 1-2 US\$ per rumah tangga, sesuai ukuran rumah. Rumah tangga membayar koperasi, yang melakukan pembayaran kolektif kepada Departemen Keuangan.

Tiga komunitas pertama mulai pada Desember 2004 dan duabelas komunitas akan selesai diperbaiki dalam beberapa tahun. Selain rumah dan infrastruktur, kanal diperbaiki dan jalur hijau baru selebar 5 meter dengan pepohonan di tepiannya menyediakan akses menuju permukiman, ruang bermain anak-anak, juga tempat bertemu dan berjualan para pedagang gerobak makanan dan barang. Komunitas Bang Bua melaksanakan festival pembersihan kanal berkala, menggunakan kompos organik dan tanaman air untuk membersihkan air kanal, dan terus bernegosiasi dengan pencemar di hulu untuk mengurangi effluen beracun pada kanal. "Pasar terapung" yang dikelola komunitas juga direncanakan.

Sumber: CODI



PHOTOS: ACHR

**Sebelum:** Komunitas Bang Bua sebelum perbaikan. Rumah kayu yang ringkih membuat masyarakat dihantui bahaya kebakaran.



**Sesudah:** Rumah baru di Bang Bua umumnya dibangun menurut tiga rancangan pengembangan para penghuni sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.



PHOTO: ACHR

*Pagtambayayong telah menunjukkan melalui berbagai proyek bahwa saat kebutuhan perumahan kaum miskin kota terpenuhi, hal ini berarti kabar baik untuk keseluruhan kota.*

## 4 Kemitraan dalam hal pendanaan perumahan

Kota Cebu di Filipina selatan telah menjadi tapak banyak skema pembangunan kembali dan relokasi permukiman kumuh yang menciptakan preseden, merangkul komunitas miskin, pemerintah kota, kalangan usaha swasta, pemilik lahan, dan LSM dalam kemitraan efektif. Kota Cebu menunjukkan bahwa kemitraan dengan komunitas miskin sebagai aktor utama dapat menyelesaikan masalah perumahan kota satu per satu.

Permukiman informal di Cebu tak lagi sering mengalami penggusuran. Serangkaian pilihan praktis pengganti penggusuran telah diuji, terus berkembang, dan menjadi pilihan lebih pasti: berbagi lahan (*land-sharing*), pertukaran lahan (*land-swapping*), pembelian kembali (*buying-back*), relokasi sukarela, dan pembangunan kembali in-situ. Perlu bertahun-tahun untuk membangun komunitas kuat, pemerintah kota yang terbuka menerima masukan, LSM berpola pikir tidak konvensional, dan kapasitas seluruh kota untuk mewujudkan kemitraan.

Salah satu kekuatan paling kreatif dan energik di balik pendekatan inovatif Cebu terhadap komunitas miskin kota adalah *Pagtambayayong Foundation*. 30 tahun LSM ini bekerja dengan komunitas miskin, pemerintah kota, dan LSM lain dalam pengambilalihan lahan, perumahan

sosial, pendanaan perumahan, dan bahan bangunan murah. *Pagtambayayong* menyalurkan lusinan pinjaman Program Pegadaian Komunitas (*Community Mortgage Programme, CMP*). Bersama jaringan LSM dan organisasi komunitas, *Pagtambayayong* berjuang menjaga keberlangsungan CMP melalui kampanye, perbaikan administrasi program, dan perluasan pinjaman untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga. (*Lihat Panduan Ringkas 5 mengenai Pembiayaan Perumahan*).

### Program pendanaan yang dimiliki kaum miskin

Banyak proyek perumahan di Cebu dimungkinkan oleh Program Pegadaian Komunitas (CMP) pemerintah. Antara tahun 1993 dan 1997, CMP menyediakan pinjaman bunga rendah tanpa jaminan (melalui penyalur dan asosiasi komunitas) bagi 46.000 rumah tangga pemukim ilegal untuk membeli lahan dan melegalkan situasi mereka, namun macetnya pengembalian dana menodai satu-satunya program perumahan negara yang langsung menjangkau kaum miskin perkotaan melalui pendanaan proyek beranggaran sangat rendah yang dikelola komunitas, tanpa melibatkan kontraktor maupun pengembang.

Sumber: ACHR

## Kemitraan pendanaan perumahan di Filipina

- 1 SITUASI:** Komunitas pemukim ilegal beranggotakan 60 rumah tangga bermukim di lahan bernilai komersial tinggi di belakang Rumah Sakit Cebu. Pemilik lahan ingin membersihkan dan membangun lahan tersebut. Pagtambayayong membantu komunitas melakukan negosiasi bagi lahan alternatif yang disetujui semua orang, berjarak 2 kilometer dari lokasi, di jalur hijau daerah pinggir kota Sareehay.
- 2 PERJANJIAN:** Sebagai imbal balik pemindahan, pemilik lahan bersedia “membeli kembali” lahan dari tiap rumah tangga dengan harga negosiasi 1.000 Peso (22 US\$) per meter persegi (berdasarkan ukuran rumah), sebagai kompensasi biaya pemindahan dan pembangunan kembali. Sebagai tambahan, pemilik lahan bersedia membeli dan membangun utuh lahan alternatif yang telah disetujui komunitas, yang akan dialihkan kepada komunitas lewat *Sareehay Sanciangko Riverside Homeowners Association*, yang kemudian akan memecah-mecah lahan tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama tiap rumah tangga.
- 3 PROYEK:** Melalui kontrak dengan Eco-Builders (usaha konstruksi Pagtambayayong), pemilik lahan membayar survei lahan baru, pembangunan jalan, drainase, dan jaringan air di Sareehay, sesuai rencana tapak komunitas yang digambar dalam beberapa sesi kerja dengan bantuan Pagtambayayong. Rencana ini meliputi pusat komunitas, lapangan bermain besar di bagian tengah dan kapling 36 atau 54 meter persegi, bergantung pada status rumah tangga sebagai penghuni atau pemilik pada permukiman lama.
- 4 RUMAH:** Masyarakat menggunakan uang pembelian kembali untuk membangun rumah baru. Beberapa mengambil pinjaman CMP untuk menambah anggaran. Rumah-rumah bervariasi dari gubuk bambu struktur panggung, hingga rumah blok kokoh 2 lantai. Kebanyakan rumah tangga membangun sendiri menggunakan kembali bahan bangunan dari rumah lama, namun beberapa mengontrak Eco-Builders untuk membangun rumah-baris murah menggunakan batako dan atap semen-mikro. Atap dibuat tinggi untuk menyediakan ruang bagi penambahan lantai dua kelak. *Sumber: ACHR*

### Semua menang:

*Sareehay membantu menciptakan preseden penting di Cebu, pemilik lahan yang diuntungkan setelah lahannya terbebas dari pemukim miskin berbagi sebagian tanggung jawab dengan cara menyediakan lahan alternatif dan membantu proses pemukiman kembali komunitas. Pemilik lahan kemudian dapat menarik keuntungan real estat, dan rumah tangga miskin mendapatkan lahan dan rumah yang layak dan aman..*



# 5

## Kemitraan dalam hal sanitasi

Sebagian besar anggaran infrastruktur India tercurah ke kota, namun hanya sedikit terkucur bagi sanitasi permukiman kumuh. Akibatnya, sebagian penduduk perkotaan India tak memiliki akses terhadap kakus yang berfungsi. Beberapa terobosan di Mumbai dan Pune menjadi contoh bagus mengenai hal yang terjadi saat pemerintah menetapkan sanitasi sebagai prioritas, dan bergandeng tangan dengan federasi komunitas miskin untuk menjamin setiap rumah tangga miskin di kota memiliki kakus bersih.

Jutaan masyarakat miskin di kota-kota India membuang hajat di sepanjang jalan, rel kereta, dan jalan setapak, walaupun diteriaki, dicemooh, dilempari, dan dipermalukan. Siapapun tak mau menahan perlakuan ini bila ada pilihan lain. Kakus tak tersedia atau berada pada kondisi maupun lokasi sedemikian buruk sehingga buang hajat di daerah publik lebih dipilih. Permukiman kumuh India penuh dengan kakus umum rusak, tak terencana baik, tak terpelihara, dan minim penerangan. Bagi perempuan dan anak-anak ini sangat menyulitkan.

Pemerintah mulai sadar, jika setengah penduduk kota hidup di lingkungan buruk dan tak sehat, tanpa akses sarana dasar, ini merupakan kabar buruk bagi keseluruhan kota. Akan tetapi kebanyakan pejabat yang membuat keputusan mengenai sanitasi permukiman kumuh belum pernah melihat contoh nyata kakus yang dikelola komunitas. Kurangnya pengetahuan ini membuat perubahan berjalan lamban. Sangat sedikit contoh cara membuat kakus yang terjangkau, dapat direplikasi, dan berhasil.

Sejak 1995, persekutuan *National Slum-dwellers Federation*, *Mahila Milan* dan SPARC membantu komunitas kumuh lebih dari 50 kota India merancang dan membangun kakus yang dikelola komunitas. Mereka mulai kecil-kecilan dengan blok kakus 5 hingga 10 kamar di Mumbai, Kanpur, dan Bangalore. Kakus awal ini merupakan uji-coba, contoh untuk dilihat dan dipelajari semua orang. Mereka menunjukkan cara baru bagi komunitas miskin dan pemerintah untuk bekerja sama menyediakan kakus yang lebih baik, murah, dan menggunakan sumber energi terbesar di India: *komunitas miskin*.

### Biaya bersama, tanggung jawab bersama

*Paradigma National Slum-dwellers Federation tentang kakus biaya bersama sederhana adalah seperti ini: komunitas merencanakan, membangun, dan memelihara kakus bersama di permukiman mereka, dengan perbandingan satu kakus per empat rumah tangga. Negara memberikan saluran pembuangan, pasokan air dan listrik menuju tapak, dan membayar biaya bahan.*

*Sumber: Toilet Talk, SPARC*



PHOTO: SPARC



Sesuatu yang mengejutkan dari kakus komunitas NSDF adalah bahwa kakus umum di pemukiman kumuh tak harus selalu kotor. Kebanyakan kakus ini begitu bersih hingga menjadi tempat perhentian bagi pekerja pabrik, pengangkut barang, dan penarik rickshaw, yang dengan senang membayar satu rupee untuk kakus yang bersih. Masyarakat berkumpul di luarnya, yang kemudian menjadi tempat berjualan para pedagang.

## Kemitraan sanitasi di Mumbai, India

Persekutuan NSDF/MM/SPARC secara dramatis meningkatkan skala program bangunan kakus saat mereka dikontrak untuk membangun 113 blok kakus (2.000 kamar) di Pune, melalui inisiatif Pejabat Pemerintah Kota, kemudian 320 blok lainnya (6.400 kamar) di Mumbai, di bawah Proyek Sanitasi Mumbai dengan dana World Bank. Kedua proyek ini, yang menyediakan sanitasi bagi 1 juta masyarakat, saat ini telah rampung dan kerja penyediaan kakus di kota-kota lainnya siap dilaksanakan. Tantangannya adalah menggunakan konstruksi 433 kakus ini untuk menciptakan norma dan standar baru bagi rancangan, konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan kakus berdana pemerintah kota di komunitas miskin. Beberapa inovasi yang terlihat pada kakus ini:

- **Penyediaan sarana dasar:** Strategi ini menciptakan lapangan kerja, membangun keterampilan komunitas, dan mengubah hubungan antara kota dan komunitas miskin, dengan membuat penyediaan layanan menjadi kerja sama dan bukan aktivitas kontrak.
- **Norma rancangan:** Blok kakus lama dari pemerintah tak memisahkan antara bagian pria dan wanita, dan tak memiliki pasokan air bersih. Kakus baru dirancang dengan seperangkat fasilitas, bagian pria dan wanita terpisah, kakus khusus anak-anak, urinal terpisah, tempat mandi privat, pasokan air dan fasilitas penyimpanan, ruang bagi pengantri, ruang pengurus, dan dalam banyak kasus ruang untuk toko teh dan *pan*.
- **Kontrak:** Dalam banyak komunitas, perempuan melakukan kontrak kakus secara keseluruhan, kemudian menggaji pekerja dari komunitas, mengelola uang, mengawasi kerja konstruksi dan berkoordinasi dengan insinyur dan pengawas dari pihak kota.
- **Kemitraan:** Proyek ini mengubah cara kemitraan antara pemerintah kota dan komunitas, dan mengubah cara kota berdialog dengan komunitas maupun LSM untuk melakukan kontrak penyediaan layanan.
- **Pendanaan:** Di kedua kota, kota membayar konstruksi kakus dan komunitas membayar untuk pemeliharaan, pasokan air, dan listrik
- **Pemeliharaan:** Kakus ini dipelihara oleh komunitas – oleh penagih Mahila Milan yang menjangkau seluruh kota, atau oleh komunitas lokal sendiri, dengan biaya bulanan ringan sebesar 10 rupees (0,25 US\$) per rumah tangga. Semua kakus memiliki ruang pengurus di dalam.

Sumber: ACHR

# 6

## Kemitraan dalam hal infrastruktur

- Komunitas sebagai perancang
- Komunitas sebagai insinyur
- Komunitas sebagai kontraktor

Sistem kontrak komunitas Sri Lanka menjadi contoh bagus mengenai cara pemerintah memfasilitasi penyediaan sarana dasar dan infrastruktur bagi komunitas miskin kota dengan anggaran dan upaya relatif kecil, dengan memberikan kontrak kerja keseluruhan kepada komunitas, dan membiarkan mereka merancang, membangun, dan mengelola perbaikan ini.

Sekitar setengah populasi Colombo hidup di 1.506 permukiman miskin. Permukiman ini bervariasi dari 60 hingga 1.200 rumah tangga – banyak di antaranya sangat-sangat tak terlayani. Sejak 1980, kebanyakan komunitas ini didukung merencanakan dan melakukan sendiri perbaikan infrastruktur, di bawah sistem kontrak komunitas.

Gagasan kontrak komunitas pertama muncul di bawah *Program Sejuta Rumah*, program pemerintah nasional yang inovatif dan berbasis komunitas, diluncurkan tahun 1985 di 51 kota

besar dan kecil di Sri Lanka, dengan dukungan teknis dari National Housing Development Authority (NHDA). Di bawah program ini, tiap komunitas membentuk *dewan pengembangan komunitas*, yang kemudian melakukan survei dan pemetaan permukiman yang ada, dan bekerja sama dengan staf NHDA untuk menggambar tatanan baru perumahan, jalan, ruang komunitas, dan jaringan infrastruktur untuk tiap komunitas.

Di bawah *Program Sejuta Rumah*, komunitas dapat mengajukan pinjaman ringan untuk mendukung proyek infrastruktur yang mereka rencanakan dan bangun sendiri, melalui *kontrak komunitas* antara komunitas dan pemerintah setempat.

Alih-alih menyewa kontraktor dan insinyur, komunitas melakukan kerja pembangunan sistem pasokan air, kakus, drainase, jalan setapak, dan jalur akses sendiri, dan pemerintah mendukung mereka dengan bantuan teknis dan pendanaan. Sistem kontrak komunitas memberikan kendali penuh bagi komunitas atas keseluruhan proses penyediaan infrastruktur, dan cara ini sederhana, fleksibel, transparan, dan berbasis komunitas.

Antara 1984 dan 1989 lebih dari 38.000 rumah tangga di Colombo mengalami peningkatan kondisi lingkungan dan perumahan secara dramatis di bawah program ini, yang kemudian berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Program Sejuta Rumah berakhir mendadak tahun 1993, namun sistem kontrak komunitas masih hidup di Sri Lanka, dalam skala yang lebih kecil, dan masih memberdayakan komunitas untuk merancang, menerapkan, mengelola, dan memelihara infrastruktur permukiman mereka sendiri, dengan dukungan dari pemerintah, kewenangan lokal, LSM, dan badan lainnya. *Sumber: Sevanatha*



PHOTO: UN-HABITAT



**Lebih murah saat komunitas miskin melakukan pekerjaannya sendiri:**

*Pemerintah hanya memerlukan 29.000 USD untuk menyediakan air, drainase, dan saluran pembuangan bagi 109 rumah tangga di Poorwarama. Ini hanya 266 US\$ per rumah tangga – sangat kecil dibandingkan biaya yang diperlukan pemerintah atau kontraktor swasta untuk pekerjaan yang sama.*

*Sumber: Sevanatha*

## Kemitraan infrastruktur di Sri Lanka

Perbaikan di Komunitas Poorwarama, Colombo menjadi contoh bagus kemitraan pemerintah-komunitas yang diusung oleh sistem kontrak komunitas, untuk penyediaan sarana dasar bagi komunitas miskin. 109 rumah tangga di Poorwarama direlokasi ke tempat ini tahun 1999 dari permukiman mereka yang berusia 50 tahun, lewat perjuangan pengurusan yang panjang dan pahit, demi pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit. Rumah tangga miskin ini akhirnya berhasil melakukan negosiasi paket pemukiman kembali yang memberi kapling 50 meter persegi di lahan berdekatan yang mereka cari sendiri, dan sejumlah kecil kompensasi uang untuk membangun rumah sementara – tanpa sarana dasar. Dengan bantuan LSM Sevanatha, mereka mengidentifikasi dan membuat prioritas kebutuhan, kemudian membagi perbaikan permukiman menjadi beberapa proyek terpisah untuk diajukan sebagai proposal kontrak komunitas kepada Urban Settlement Improvement Project (USIP) atau Road Development Authority (RDA) untuk didanai.

- 1 Keran individu:** Kontrak komunitas pertama melibatkan pembangunan sistem penyediaan air yang menghubungkan keseluruhan 109 rumah dengan sambungan pipa bermeteran, didanai hibah 6.000 US\$ dari RDA, untuk itu komunitas memberikan kontribusi sebesar 36 US\$ per rumah tangga. Keseluruhan sistem dibangun penghuni lokal dengan gotong royong.
- 2 Drainase air kotor:** Kontrak ke dua melibatkan pembangunan sistem drainase air kotor terbuka meliputi seluruh komunitas, terhubung dengan kamar mandi dan dapur tiap rumah tangga, didanai hibah 9.500 US\$ dari USIP, dengan kontribusi komunitas sebesar 5 US\$ per rumah tangga. Mereka mengelola konstruksi sendiri, menyewa pekerja dari komunitas.
- 3 Jaringan air kotor:** Kontrak selanjutnya adalah sistem air buangan bawah tanah untuk limbah kakus dari keseluruhan 109 rumah. National Housing Development Authority menyediakan hibah 13.500 US\$, dengan kontribusi komunitas sebesar 5 US\$ per rumah tangga. Rumah tangga merancang, membangun, dan memelihara, menggunakan tenaga sewa dari komunitas, dengan bantuan teknis Sevanatha. Tiap rumah tangga bertanggung jawab atas kakus masing-masing.

# 7

## Kemitraan dalam program pemulihan pasca bencana

Kebanyakan kerja pemerintah dalam pemulihan pasca bencana dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, yang melihat masyarakat sebagai korban tak berdaya. Bantuan memang sangat dibutuhkan setelah bencana besar, namun pengalaman tsunami 2004 Thailand menunjukkan, saat komunitas dapat didukung melakukan sendiri pemulihan dan rehabilitasi, bermitra dengan pemerintah dan badan pemulihan, tak ada yang tertinggal, dan proses ini memperkuat komunitas.

Setelah tsunami menyerang Thailand selatan, Community Organizations Development Institute (CODI) bertemu dengan LSM, kelompok warga, jaringan komunitas, dan organisasi pemerintah di wilayah selatan negara itu untuk mencari cara kerja sama membantu korban tsunami di enam propinsi yang hancur.

Sudah jelas bahwa penyediaan pemulihan cepat dan efektif setelah bencana besar semacam ini jauh di luar jangkauan penanganan pemerintah atau organisasi manapun sendiri-sendiri. Kerja ini membutuhkan gabungan dukungan, keterampilan, dan sumber daya sebanyak mungkin kelompok, individu, badan pemulihan,

dan jaringan komunitas. Save the Andaman Communities Network buru-buru dibentuk dan kelompok kerja dikirim ke tiap provinsi yang terkena untuk melakukan survei kerusakan dan menyediakan bantuan pemulihan bagi masyarakat di desa-desa korban tsunami dalam bentuk tenda, pakaian, obat-obatan, makanan, air, peti mati, dan penyapuan untuk mencari korban tewas. Dalam seminggu, kerja pembangunan perumahan sementara di kamp pemulihan dimulai.

Selain mengakibatkan kematian dan kerusakan, tsunami membuka banyak masalah yang tersembunyi sebelumnya: kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian pemilikan lahan. Tsunami juga menciptakan masalah baru saat penghidupan masyarakat, struktur sosial, sistem pertahanan hidup, dan cara hidup tersapu begitu saja, bersama dengan rumah dan perahu mereka. Semua kemalangan membawa peluang tak terduga bagi komunitas pesisir yang rawan ini, untuk memanfaatkan proses pemulihan sebagai cara memecahkan masalah lebih dalam dan struktural yang akan mengacaukan masa depan mereka.

Sumber: [www.achr.net](http://www.achr.net)

*CODI dan para mitranya berupaya menggunakan semua aspek proses pemulihan untuk menata dan memperkuat komunitas pesisir yang terkena tsunami, dan menempatkan mereka di pusat proses rehabilitasi, bicara atas nama mereka sendiri, dan memutuskan apa yang ingin mereka lakukan, bukan pada posisi korban yang tak berdaya.*



PHOTO: BANGKOK POST

## Kemitraan paska tsunami di Thailand

### Pemulihan yang dikelola masyarakat di Kamp Bang Muang

Segera setelah tsunami, jelas bahwa kebutuhan paling mendesak adalah rumah sementara untuk mengembalikan masyarakat yang tercerai-berai agar dapat menata diri, berdiskusi, menetapkan prioritas, dan mulai membangun visi kolektif akan masa depan mereka.

Kamp segera didirikan oleh organisasi bantuan dan badan pemerintah di sepanjang pesisir Andaman. Di Phangnga, provinsi yang menderita kerusakan paling parah, jaringan CODI membantu pendirian lima kamp – yang pertama dan terbesar di Bang Muang. Walau direncanakan untuk 400 orang, kamp ini akhirnya menaungi 3500 orang, kebanyakan dari daerah terdekat, Ban Nam Khem, desa terkena paling parah dengan lebih dari 2.000 orang tewas dan 1.300 rumah hancur.

Keunikan Kamp Bang Muang adalah pengelolaan yang dilakukan korban tsunami sendiri. Pemimpin jaringan komunitas, pelaksana dari CODI, dan NGO bekerja sama dengan para korban selamat menata kamp ini. Setelah menempatkan kakus, area mandi, tenda masak, dan ruang kegiatan pemulihan, mereka membuat barisan tenda rapi dengan

sistem kelompok 10 rumah tangga dan zona 3 kelompok, masing-masing memiliki pemimpin. Panitia dibentuk untuk mengelola kegiatan masak, kebersihan kamp, air bersih, layanan medis, kunjungan, kegiatan anak-anak, orang hilang, pendaftaran pendatang baru, donasi, dan konstruksi rumah sementara. Pertemuan kamp digelar tiap malam untuk mendiskusikan aspek praktis pengelolaan kamp, menyiarkan pengumuman, dan memberikan kesempatan panitia melaporkan kerja mereka sehari itu. Semua tahu apa yang tengah terjadi dan semua keputusan dilakukan di depan khalayak, dengan persetujuan semua orang. Bengkel perbaikan kapal mulai didirikan, kelompok simpan-pinjam dan bank komunitas, dan proyek kelangsungan penghidupan diluncurkan untuk menggerakkan masyarakat, di tengah hadangan hilangnya mata pencaharian dan kompensasi pemerintah yang lambat.

Ada banyak duka tentu, namun yang mengejutkan banyak pengunjung Bang Muang adalah suasana yang begitu hidup, seperti perayaan desa, bukan kamp pengungsian. Kehidupan jelas berjalan terus. [www.achr.net](http://www.achr.net)

#### **Bencana sebagai peluang pembangunan:**

*Gagasannya adalah mencari cara praktis bagi korban hidup paska tsunami untuk terlibat menjalankan kamp mereka dan secara aktif mengelola sebanyak mungkin aspek kehidupan mereka, bahkan dalam situasi ekstrim ini, sehingga mereka dapat kembali ke moda aktif mengurus diri mereka sendiri.*



PHOTO: ACHR



*Kebanyakan instrumen yang bagus adalah yang mendidik dan menggerakkan dalam waktu bersamaan. Instrumen ini memiliki dua sisi: ada nilai praktis dan strategis bagi komunitas dalam perjuangan mereka untuk pemilikan lahan, rumah yang aman, sarana dasar, dan pekerjaan.*

## 6 Instrumen yang digunakan komunitas untuk membangun organisasi mereka

Saat kita melihat banyaknya organisasi komunitas di negara-negara Asia, ada dua pertanyaan yang harus diajukan:

- 1** apakah terjadi negosiasi antara organisasi komunitas ini dengan pemerintah?
- 2** jika ya, keterampilan apa yang membantu komunitas untuk menaikkan negosiasi, dan alat apa yang membantu membangun keterampilan itu?

Sebelum komunitas dapat tampil sebagai mitra pembangunan terpercaya untuk mengatasi masalah kota, mereka perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Satu bagian penting dari persiapan ini adalah membangun mekanisme pengambilan keputusan yang kuat dan demokratis dalam komunitas, yang mencerminkan kepentingan semua anggota – yang lebih kaya maupun miskin, pemilik rumah dan penyewa. Bagian lain adalah membangun keterampilan mengelola uang secara kolektif, menjalin jaringan, mengumpulkan informasi mengenai permukiman mereka, mencari lahan alternatif, dan membangun rencana perumahan alternatif yang realistis untuk menangani isu keberlangsungan hidup masyarakat maupun pembangunan kota.

Pemimpin komunitas memerlukan instrumen-instrumen untuk menggerakkan komunitas miskin mereka dan komunitas lainnya, untuk membentuk “massa kritis” sebagai prasyarat menggulirkan perubahan nyata berskala lebih besar. Instrumen-instrumen ini muncul bertahap, dari percobaan dan penerapan praktis dalam gerakan komunitas Asia, dan kini secara aktif digunakan.

Saat sesuatu yang dilakukan komunitas miskin di satu tempat terbukti bermanfaat, ini akan diulangi. Pengulangan menjadikannya bagian dari kerja dan penggunaan untuk tujuan lebih besar. Semakin banyak digunakan, semakin banyak penyempurnaan yang terjadi dan pendekatan terhadap standar. Dan sebelum kita sadari, kita telah memiliki alat yang tepat. Alat masyarakat. Melalui transfer dan adaptasi, alat ini tercipta kembali di tempat lain, menciptakan alat baru. Seperti halnya alat apapun, manusia bisa menguasai hanya dengan menggunakannya: alat yang membantu mereka melakukan negosiasi dengan negara, menjelajahi kemungkinan rancangan rumah, membentuk kelompok simpan-pinjam, atau menganalisa kondisi permukiman mereka.

*Sumber: Face to Face. [www.achr.net](http://www.achr.net)*

## INSTRUMEN 1: Pendataan permukiman

Pendataan permukiman oleh masyarakat miskin dapat menjadi alat penuh daya, sekaligus penggerak komunitas. Saat komunitas dan jaringan melakukan survei permukiman miskin dan informal, mereka kerap mengumpulkan data yang belum pernah terkumpul sebelumnya tentang angka, penghidupan, masalah, dan kondisi kehidupan segmen besar populasi perkotaan.

Karena informasi yang dikumpulkan masyarakat seringkali lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan data pihak berwenang, hasilnya adalah perencanaan lokal yang lebih baik dan tepat, dan ini bisa menjadi alat yang kuat untuk melakukan negosiasi lahan dan akses pemilikannya. Informasi survei yang baik menempatkan komunitas pada posisi yang proaktif saat bernegosiasi. Dengan data rinci, pemerintah lokal juga lebih mudah menjustifikasi dan menempatkan intervensi. Seringkali untuk

pertama kalinya, survei juga memberikan identitas resmi bagi setiap orang yang tinggal di permukiman informal.

### Pendataan di India

Dua puluh tahun lalu tak ada kebijakan bagi tuna wisma di Kota Mumbai – bahkan tak seorangpun mengakui keberadaan mereka. Tiap hari permukiman kumuh jalan digusur, namun satu-satunya hal yang jelas adalah: tugas kota menghancurkan dan tugas masyarakat miskin membangun kembali. Survei pertama tuna wisma tahun 1986, terdokumentasi dalam “We the Invisible,” mendefinisikan dunia yang tak pernah diketahui pada orang banyak. Ini mencetuskan berdirinya Mahila Milan, organisasi komunitas yang akhirnya menghadirkan kebijakan permukiman bagi tuna wisma di seluruh kota. Sambil jalan, mereka berpindah dari satu kota ke kota lain di India, Asia, dan Afrika, membantu kalangan lain melakukan pendataan serupa. Moto mereka: “Saat ragu, hitunglah!”

## INSTRUMEN 2: Pemetaan komunitas

Untuk organisasi komunitas seluruh Asia, satu bagian penting dari proses pengumpulan data mereka adalah membuat peta permukiman, yang mencakup rumah, toko, bengkel, jalan, titik air, tiang listrik, dan titik bermasalah, sehingga masyarakat dapat memiliki gagasan visual mengenai situasi fisik mereka. Pemetaan merupakan cara membangun keterampilan yang vital saat membicarakan rencana

perbaikan permukiman dan mengakses intervensi pembangunan. Di Thailand, misalnya, komunitas tepi kanal menggambar peta berskala permukiman mereka, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kembali, dan melakukan perjalanan ke daerah hulu untuk mencari dan memetakan sumber pencemaran dari pabrik, rumah sakit, restoran, dan saluran air kotor. Mereka mempelajari keterampilan ini dari penghuni kanal lainnya. Dengan informasi primer yang rinci dan akurat mengenai sumber pencemaran, peta komunitas ini dapat menjadi alat perencanaan dan mobilisasi yang efektif. Peta komunitas ini juga dapat menjadi alat negosiasi yang efektif dengan otoritas yang menyalahkan komunitas tersebut sebagai pencemar kanal sehingga mereka mendapatkan jaminan bermukim.



PHOTO: ACHR

## INSTRUMEN 3: Simpan pinjam komunitas

Untuk jaringan, federasi, dan organisasi komunitas di Asia, simpan-pinjam komunitas telah menjadi salah satu elemen fundamental dalam pertumbuhan dan keberhasilan mereka menggulirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat miskin. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa simpan pinjam kolektif telah menciptakan revolusi bagi organisasi komunitas di Asia. Mengapakah simpan pinjam kolektif sangat penting bagi kaum miskin?

**1 Cara yang paling sederhana dan langsung bagi kaum miskin pada saat mendesak.** Simpan pinjam yang dikelola komunitas memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dan membuat keputusan bersama mengenai kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka melalui mekanisme sederhana. Simpan pinjam kolektif menyediakan basis sumber daya yang dapat diatur oleh kaum miskin, sekaligus proses belajar secara menerus mengenai kehidupan satu sama lain, pengelolaan bersama, dan cara menjalin hubungan dengan sistem luar yang memiliki kekuatan finansial lebih besar.

**2 Efektif untuk membangun organisasi komunitas.** Tabungan merupakan alat untuk membangun proses pengembangan diri yang komprehensif dalam permukiman miskin perkotaan, kaum miskin sendiri (dan jaringan besar komunitas miskin) secara perlahan membangun kepercayaan diri, kapasitas pengelolaan, dan skala yang mereka perlukan untuk berhubungan dengan sistem formal dan menjadi pemain yang lebih kuat dalam proses pengembangan perkotaan yang lebih luas.

**3 Menciptakan struktur kerja sama yang saling menguntungkan dan aksi kolektif.** Dengan menciptakan hubungan berkala antar orang, tabungan membantu masyarakat miskin bekerja sama menangani masalah kemiskinan yang lebih besar, misalnya kepastian pemilikan, perumahan, sarana dasar, penghidupan, dan kesejahteraan. Dengan membangun kerangka untuk mengelola tugas pembangunan yang lebih rumit, kelompok simpan pinjam dapat membantu mendukung pembangunan komunitas secara holistik.

**4 Membangun kekuatan dan modal.** Mungkin saja satu kelompok simpan-pinjam mengurus berbagai kebutuhan internal komunitas, atau organisasi komunitas tanpa kelompok simpan-pinjam menjalin hubungan dan menata kekuatan masyarakat hingga batas tertentu, namun simpan-pinjam di pusat proses berarti kekuatan sekaligus modal: dua elemen esensial untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin.

**5 Membangun keterampilan masyarakat untuk menangani proyek pembangunan yang lebih besar.** Tabungan membangun kapasitas pengelolaan kolektif yang diperlukan komunitas untuk memasuki kerja sama dengan pemerintah kota. Aset kolektif yang digambarkan oleh tabungan dapat menjadi kartu tawar yang kuat saat komunitas melakukan negosiasi untuk sumber daya dari luar bagi proyek perumahan dan pembangunan, dan saat menjalin hubungan dengan sistem formal. (*Lihat Panduan Ringkas 5 mengenai Pembiayaan Perumahan*)

*Sumber: UCDO Update, No. 2, October 2000. Unduhan dari [www.codi.or.th](http://www.codi.or.th)*



“Sebuah negara tanpa kementerian keuangan adalah bagai badan tanpa darah. Demikian juga komunitas miskin memerlukan seksi keuangannya sendiri untuk menangani uang dan menghubungkan masyarakat bersama untuk menentukan keputusan tentang perbaikan kehidupan mereka. Dalam komunitas, seksi keuangan itu adalah kelompok simpan-pinjam.”

Somsook Boonyabancha, CODI, Thailand

## Bukan lagi pengemis

**Komunitas yang memiliki posisi setara di atas meja negosiasi berada pada posisi siap bekerja sama dengan kota sebagai mitra**

Pada saat kelompok simpan-pinjam saling terhubung, terdapat jaringan yang membuka akses terhadap sumber pendanaan lebih besar dan meningkatkan kekuatan negosiasi untuk mendapatkan kebutuhan. Kelompok ini memungkinkan organisasi komunitas miskin menjadi mitra setara bagi badan pemerintah dan LSM, karena dengan memiliki sumber daya sendiri, mereka tidak lagi berada pada posisi pengemis karena dapat memutuskan sendiri pembangunan yang mereka inginkan.

Proses ini berimplikasi politis, karena semakin kuat status jaringan simpan-pinjam, semakin memungkinkan kaum miskin untuk berhadapan dengan isu struktural yang melandasi masalah mereka. Seiring pertumbuhan jaringan, mereka menjadi mitra pembangunan yang dipilih pemerintah lokal maupun nasional untuk bekerja sama menciptakan solusi masalah perumahan, pemilihan lahan, infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan. Kelompok simpan-pinjam komunitas juga dapat menjembatani jurang antara sistem keuangan informal dan formal. Pinjaman untuk perumahan, lahan, dan proyek pembangunan infrastruktur di

komunitas miskin kini disalurkan secara kolektif, melalui kelompok simpan-pinjam di berbagai negara.

## Tabungan harian

Praktek tabungan harian dipelopori oleh komunitas miskin di India dan Afrika Selatan, namun gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh Asia. Mengapa tabungan harian berhasil bagi banyak organisasi komunitas?

Tabungan harian memungkinkan kelompok simpan-pinjam menanamkan akar baru dalam komunitas – akar pengikat kebersamaan berbasis harian yang tumbuh lebih dalam daripada tabungan bulanan yang digambarkan sebagai “transaksi satu hari dan tidur di 29 hari lainnya.” Tabungan harian juga menarik bagi anggota komunitas yang termiskin, yang memperoleh penghasilan berbasis harian, dan yang merasa kesulitan dengan tabungan bulanan. Plus, saat orang menabung dan membayar kembali pinjaman secara harian, artinya pembayaran lebih kecil, lebih teratur, dan tak terlalu mengerikan seperti pembayaran bulanan berjumlah besar, sehingga pengembalian pinjaman lebih mudah dikelola dan tak bermasalah.

Sumber: UCDO Update, No. 2, October 2000. Unduhan dari [www.codi.or.th](http://www.codi.or.th)

## INSTRUMEN 4: Membangun jaringan komunitas

Kelompok simpan-pinjam kecil yang berserakan, saat berkembang dan bertambah mapan hampir pasti akan terhubung dengan kelompok lain dan membentuk jaringan berskala lebih besar dengan basis keuangan atau organisasi yang saling terhubung. Jaringan menyediakan dukungan horizontal bagi satu komunitas dan peluang untuk bertukar pengalaman dan belajar. Jaringan juga menciptakan peluang pengumpulan sumber daya. Kolaborasi semacam ini menyediakan akses terhadap sumber dana, rasa setia kawan, dan kekuatan yang lebih besar saat bernegosiasi dengan negara atau aktor lain dalam hal pemilikan dan sumber daya perkotaan.

Proses ini berimplikasi politis, karena semakin kuat status jaringan, semakin memungkinkan bagi kaum miskin untuk berhadapan dengan isu struktural yang lebih besar yang melandasi masalah mereka – isu di luar kapasitas mereka

sebelumnya, sebagai komunitas kecil terasing. Jaringan menempatkan masyarakat miskin pada posisi tawar lebih kuat dan membuktikan bahwa proses pembangunan komunitas swakelola bisa berjalan dan mampu melakukan kerja berskala kota, yang tak mampu dilakukan oleh sistem dan institusi yang ada selama ini. Hal penting lain terkait perbesaran skala kerja, komunitaslah – bukan individu – yang harus merancang dan menguji solusi, dan bila berhasil, membaginya dengan yang lain. Bila keseluruhan komunitas tak berhasil melintasi perubahan dalam mencari solusi, mereka takkan berhasil memberdayakan para pemimpin untuk menetapkan pilihan yang baik. Untuk itu, kita perlu sistem belajar yang menjangkau keseluruhan komunitas, yang membawa makin banyak orang tertarik dan mempertajam visi keseluruhan komunitas. Jaringan komunitas menyediakan sistem pembelajaran semacam ini.

### Catatan tentang sumber daya dan yang mendapatkannya

Masyarakat miskin menginginkan sumber daya (lahan, rumah, akses layanan dan pendanaan), dan umumnya, sumber daya bersifat politis – bila kita definisikan politik sebagai cara mendapat akses terhadap sumber daya di kota. Tak ada komunitas yang mampu bernegosiasi sendiri dengan kota. Hanya melalui gerakan bersama dalam organisasi kolektif dengan sejumlah besar orang, barulah negosiasi memungkinkan. Salah satu pelajaran terpenting yang dipetik kelompok komunitas di Asia adalah: untuk menggulirkan perubahan perlu ada “massa kritis” beranggotakan orang-orang yang menuntut perubahan.

Pemerintah seringkali tak memiliki alat maupun keinginan untuk berurusan dengan kelompok lemah, dan lembaga masyarakat sipil mungkin terlalu marginal untuk menciptakan perubahan demi masyarakat miskin. Yang kita perlukan adalah banyak orang yang bersama-sama mencari solusi, menciptakan percobaan dalam berbagai konteks untuk membangun skala: skala pilihan, skala keterlibatan, dan skala keyakinan. Saat ribuan orang mencari jalan untuk mencapai hal yang sama, massa kritis tersebut akan menciptakan solusi dan memecahkan ketahanan terhadap perubahan, dan melarutkan penghalang antara masyarakat miskin dan sumber daya. Sumber: Face-to-face, ACHR



## 4 cara jaringan mengubah gerakan komunitas Asia:

Dalam dua puluh tahun terakhir jaringan dan federasi komunitas Asia telah menjadi mekanisme pembangunan yang vital, yang dimiliki oleh kaum miskin dan mampu mengembangkan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Jaringan berkolaborasi dengan kota untuk memulai proyek pembangunan skala kota dan menggalang kekuatan dengan kelompok sipil lainnya untuk memengaruhi kebijakan pembangunan kota secara lebih luas. Jaringan komunitas telah melalui jalan panjang untuk menjembatani jurang pengertian antara kaum miskin perkotaan dan sistem formal, dan dalam menyeimbangkan hubungan politik yang penting ini melalui beberapa hal:

**1 Mengubah skala gerakan komunitas:** Dalam model jaringan, komunitas secara individu merupakan unit struktural yang terkecil dan konstituen tingkat lokal. Saat mereka saling terhubung pada tingkat kota, provinsi, atau nasional, mereka menjadi kekuatan politik. Tanpa kedua elemen ini – komunitas secara individu pada bagian dasar dan jaringan kolektif dengan kekuatan jumlahnya – jangan harap akan terjadi perubahan struktural dengan skala cukup signifikan. Jaringan dapat bernegosiasi atas nama komunitas untuk hal yang tak tergapai oleh komunitas yang terlalu kecil.

**2 Mengubah cara penanganan masalah kemiskinan:** Dalam pembangunan, umumnya negara, agen pembangunan, dan LSM mengendalikan sumber daya dan membuat semua keputusan. Masyarakat tak memiliki banyak pilihan selain mengikuti jalur yang telah diciptakan untuk mereka, atau melepas sama sekali manfaat yang ditawarkan. Dengan jaringan, masyarakat miskin memiliki kebebasan mempelajari hal yang ingin mereka pelajari, menjelajahi berbagai pilihan, dan menetapkan pilihan dengan cara yang paling sesuai. Jaringan komunitas menyediakan landasan kuat bagi pembangunan berskala lebih besar dan membuat proses pembangunan swakarsa komunitas lebih diterima.

**3 Mengubah cara komunitas saling berhubungan:** Dalam pembangunan *top-down* tradisional, ada hubungan vertikal antara agen pembangunan dan komunitas individual. Saat masalah muncul, kurangnya mekanisme horizontal bagi komunitas untuk saling menolong membuat masyarakat tergantung pada bantuan lembaga. Sebagai saluran informasi, jaringan memungkinkan masyarakat untuk saling belajar dan menghindari kesalahan yang sama. Saat satu komunitas mengembangkan pendekatan yang berhasil, komunitas lain dalam jaringan akan mempelajarinya.

**4 Membangun mekanisme keseimbangan internal dalam komunitas:** Jaringan mempersenjatai komunitas dengan banyak alat untuk menyelesaikan masalah internal, dan mekanisme *check and balance* untuk menjaga proses pembangunan swakarsa komunitas seimbang dan adil. Pada masa lalu, saat komunitas mengalami masalah, seringkali terjadi kemacetan di semua tingkat. Jaringan menyediakan landasan lebih luas untuk transparansi. Keterbukaan ini dapat menjadi mekanisme kendali yang vital, cara menyeimbangkan semua hal, meleburkan ketegangan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang halus dan terhormat. *Sumber: www.codi.or.th*



### Tak perlu menciptakan hal-hal yang sudah ada:

*Salah satu aspek terkuat dari pertukaran adalah terjadinya perluasan repertoar pilihan. Masyarakat tak perlu mengerjakan ulang sendiri keseluruhan sistem, melainkan dapat mengimpor prosesnya bila diperlukan. Inilah yang ditawarkan oleh pertukaran dan pengumpulan pengalaman secara lebih luas di Asia.*

## INSTRUMEN 5: Saling belajar antar masyarakat

Salah satu mitos paling santer dalam bidang pembangunan adalah bahwa kaum miskin tak memperbaiki kehidupan dan permukiman mereka karena tak memiliki keterampilan yang cukup, bila mereka dilatih dengan benar, mereka bisa saja menjadi sejahtera. Akan tetapi isu kompleks yang menghalangi kaum miskin dari partisipasi ekonomi dan akses terhadap sumber daya lahan, perumahan, sarana, dan keuangan perlu lebih dari sekedar kemampuan pengelolaan ataupun teknis. Sesungguhnya ini merupakan masalah struktural eksklusi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan perencanaan dalam masyarakat kita.

Saling belajar merupakan alat pembangunan yang membantu masyarakat miskin membangun kapasitas untuk berurusan dengan isu yang menjadi akar kemiskinan dan masalah tunawisma, dan mengupayakan cara mereka sendiri untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka – secara lokal, nasional, dan global.

Saat masyarakat miskin mengunjungi masyarakat miskin di tempat lain, mereka tak “dilatih” oleh profesional manapun untuk melakukan sesuatu. Tak ada yang menyuruh

mereka mempelajari sesuatu pada suatu waktu. Masyarakat memutuskan sendiri hal yang harus dipetik dan hal yang dibuang dari kunjungan mereka ke masyarakat lain dalam situasi sama. Ini adalah proses belajar yang vital, langsung dari sumber.

Saling belajar antar komunitas terbukti bermanfaat dan menjadi alat pembangunan bersisi majemuk yang dimiliki seluruhnya oleh kaum miskin. Sebagai cara meningkatkan kepercayaan diri, memperluas pilihan, dan membangun jaringan, pertukaran komunitas horizontal merupakan obat paling mujarab melawan ketidakberdayaan dan keputusan pada komunitas di Asia. Pertukaran ini menggambarkan komitmen kolektif organisasi masyarakat miskin untuk berkomunikasi satu sama lain, mengkaji masalah mereka, menyusun prioritas, mencari solusi dan membangun kerjasama.

*Sumber: ACHR, “Face to Face”*

Masyarakat miskin memiliki keterampilan, gagasan, dan benih bagi solusi terbaik. Yang tak mereka miliki adalah ruang dan dukungan untuk menjelajahi dan menyempurnakannya.

## Pertukaran bukanlah sesuatu yang baru

**Menjalin hubungan lintas jarak dengan orang berpandangan sama merupakan impuls kemanusiaan yang paling awal, namun tak mudah bagi kaum miskin**

Masyarakat profesional, akademisi, pemerintah, dan bisnis seringkali bepergian untuk bertemu, berbagi gagasan, dan mencoba melihat melalui sudut pandang lain. Pertukaran gagasan dianggap sebagai bagian alami kehidupan profesional. Namun, kemiskinan mengisolasi kaum miskin sehingga tidak ada kesempatan untuk bertukar gagasan di luar permukiman mereka.

Padahal jika mereka diamati, terdapat: pembangunan, inovasi, negosiasi, belajar, bergerak maju dengan ribuan cara. Organisasi akar rumput Asia berada pada ujung tombak solusi swakarsa masyarakat, Lima belas tahun yang lalu tak seorangpun menyadari semua ini – semua perjuangan ini menjadi kejadian yang terisolasi.

Di sinilah proses belajar dimulai. Saat satu

solusi berhasil, pertukaran memberi peluang untuk belajar dan berbagi pengalaman, sehingga gagasan menyebar. Biasanya pemimpin komunitas (terkadang pejabat pemerintah) bepergian untuk mendapatkan pelatihan dan kemudian membawa pesan pulang. Semakin luas lingkup pertukaran, maka semakin besar kesempatan terciptanya mekanisme regional yang inovatif.

Sejumlah kelompok akar rumput dan pendukungnya telah mengamalkan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman ini selama lebih dari 20 tahun, dan terus berkembang skalanya, bertambah matang fokusnya, dan bertambah jenisnya. Pertukaran kini merupakan cara kerja dalam operasi kebanyakan jaringan dan federasi komunitas Asia, dan dalam cara belajar kaum miskin.

## SDI: Saling belajar antar masyarakat di tingkat global

Bagi banyak organisasi komunitas di Asia dan Afrika, keterlibatan dalam jaringan *Slum-dwellers International* (SDI) merupakan peningkatan alami dari pertukaran pembelajaran yang terjadi di kota, negara, dan daerah mereka. Anggota SDI melakukan pertemuan berkala untuk berbagi gagasan dan saling menawarkan dukungan, dan pertukaran horizontal tetap menjadi kegiatan utama, dalam bentuk apapun yang menawarkan manfaat terbesar bagi kaum miskin perkotaan.

Selama sepuluh tahun terakhir SDI bekerja membangun konstituensi yang kuat atas organisasi masyarakat pada tingkat global, untuk membangun dan mengartikulasikan strategi mereka dalam berurusan dengan masalah lahan, perumahan, sarana dasar, dan penghidupan, dan untuk menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok ini berbagi ilmu dan

pengalaman. Jaringan ini menawarkan seperangkat contoh hidup yang terus berkembang, di berbagai kota di berbagai belahan dunia, tempat komunitas-komunitas berhasil bernegosiasi untuk lahan yang aman lalu membangun infrastruktur dan perumahan.

Jaringan global kelompok akar rumput seperti SDI memungkinkan komunitas yang berjuang menghadapi masalah lahan dan perumahan untuk menyadari bahwa mereka tidak sendiri, orang lain pun menghadapi krisis serupa dan menemukan cara memecahkan masalah mereka. Dengan cara ini komunitas dapat memetik dari serangkaian solusi atau strategi yang mungkin tak tersedia di lingkungan terdekat mereka, namun telah diciptakan dan diuji di tempat lain.

*Sumber: ACHR*

## INSTRUMEN 6: Mempersiapkan rencana alternatif

Saat komunitas miskin terpojok dan menuntut hak mereka melalui protes, atau mempertahankan milik mereka melalui perlawanan terhadap proyek yang diusulkan, mereka menempatkan kewenangan pada posisi dengan dua pilihan: mengakui atau menolak. Situasi ini hampir selalu buntu bagi komunitas. Namun apabila terdapat peluang bagi organisasi komunitas untuk merancang strategi dan pilihan alter, dari sini dialog dengan negara dapat dimulai sebelum situasi tak tertangani.

Salah satu cara terbaik bagi organisasi komunitas untuk dipercaya sebagai mitra pembangunan adalah dengan menunjukkan gagasan alternatif yang baik pada pemerintah kota, dengan dukungan sejumlah besar

masyarakat. Ini sangat penting terutama saat komunitas miskin umumnya dianggap tak memiliki gagasan, keterampilan, tak memiliki apapun untuk ditawarkan, dan tak memegang kartu. Semakin awal komunitas menyiapkan diri dan mengembangkan solusi mereka, semakin banyak pilihan dan kendali yang akan mereka dapatkan. Mereka akan berada pada posisi menyerang, bukan bertahan.

Saat komunitas miskin datang ke meja negosiasi dengan solusi masalah perumahan yang komprehensif dan realistis dari mereka sendiri, yang mengatasi masalah keberlangsungan hidup masyarakat dan pembangunan perkotaan, akan sulit bagi kewenangan lokal untuk menutup telinga.

## Bergerak melawan status quo

Masalahnya dalam kebanyakan kasus, komunitas dan pemerintah kota tidak berada pada pola pikir negosiasi: keduanya saling curiga dan terkurung pada hubungan feodal yang mengasumsikan negara sebagai yang paling tahu. Kita lihat ini di semua negara, berulang kali komunitas dan LSM pendukung mereka berseru, “Untuk apa kita lakukan? Toh itu tanggung jawab negara.” Dan saat negara melakukan tanggung jawabnya, komunitas tak puas. Demikian terus berputar-putar. Akan tetapi saat negara jelas-jelas tak memiliki kapasitas untuk melakukan ini atau menyediakan itu, apa yang kita lakukan?

Banyak kelompok memecahkan paradigma ini dengan berbagai cara. Dalam tiap kasus, kemajuan hanya terjadi saat semua pihak maju ke meja perundingan, dan saat komunitas telah siap dengan rencana alternatif yang telah digarap dengan baik. Bagian dari persiapan komunitas ini melibatkan



penyimpanan, survei, dan pengumpulan informasi mengenai permukiman mereka, pembangunan kapasitas melalui pertukaran, dan kekuatan kolektif melalui pembangunan jaringan. Salah satu alat terpenting dalam negosiasi dengan negara adalah serangkaian rencana alternatif – rencana yang datang dari masyarakat dan mencerminkan kebutuhan lahan dan perumahan mereka beserta kapasitas mereka. Sumber: Face to Face, ACHR

*Negara mendapatkan bantuan gratis menjaga saluran air dan sistem pengendalian banjir, dan komunitas mendapatkan pemilikan lahan yang aman, lingkungan binaan lebih baik, dan rumah yang lebih baik. Semuanya menang. Gagasan ini semuanya berasal dari masyarakat – bukan dari kalangan profesional, bukan dari perencanaan, dan bukan dari pemerintah.*



PHOTO: ACHIR

## Perencanaan alternatif di Chiang Mai, Thailand

Kebanyakan kota Thailand dibangun pada rawa berpermukaan rendah, dilintasi kanal yang membantu pengendalian air dan secara tradisional menyediakan saluran perdagangan, transportasi, dan pembangunan. Banyak kanal mengalami kerusakan, digunakan untuk pembuangan limbah maupun sampah, dan komunitas miskin yang hidup di sepanjangnya disalahkan sebagai pencemar dan diancam digusur.

Tahun 1999, jaringan permukiman tepi kanal sepanjang Kanal Maekhaa, Chiang Mai, memutuskan mengakhiri ancaman penggusuran dan caci-maki puluhan tahun pemerintah kota dan mengembangkan rencana alternatif sendiri untuk memperbaiki permukiman – sekaligus kanal di tepi tempat bermukim mereka.

Mereka mulai dengan menyelenggarakan festival pembersihan kanal berkala dan besar-besaran, mengundang semua orang bekerja sama membersihkan kanal. Dengan dukungan Community Organization Development Institute (CODI), mereka mulai menciptakan perbaikan lingkungan permukiman kecil-kecilan, termasuk jalan setapak yang layak dan saluran drainase. Perbaikan awal ini – dan sambutan positif yang mereka dapatkan dari kota – memberikan kepercayaan diri bagi komunitas

untuk terus berlanjut menuju perencanaan, dan mengembangkan rencana komprehensif perbaikan permukiman.

Di beberapa komunitas para penghuni secara sukarela memundurkan rumah mereka dari ujung kanal untuk memberikan ruang bagi kapal pembersih kota, dan mereka membangun bantaran kanal sebagai taman linear dan jalur umum pejalan kaki. Proses pembersihan dan perlindungan ini juga melibatkan penjelajahan sistem penyaringan air ramah lingkungan berbasis komunitas, upaya mengurangi pencemaran air lewat negosiasi dengan pencemar sektor pemerintah maupun swasta, dan melakukan kunjungan ke komunitas di kota-kota Thailand yang telah melakukan pengelolaan dan perlindungan kanal mereka.

Sumber: [www.codi.or.th](http://www.codi.or.th)

Melalui rencana alternatif, dan semua kegiatan yang menyertainya, jaringan menunjukkan kepada kota bahwa mereka bukan perusak kanal, melainkan sekutu terbaik kota dalam membersihkan, memelihara, dan menghidupkan kembali kanal kota. Dan sepanjang proses, mereka secara bertahap menguatkan hak mereka untuk tinggal.

# Dana Pembangunan Komunitas

**Cara mudah dan fleksibel menyediakan dana dan mendukung inisiatif organisasi komunitas miskin, dengan prasyarat yang mereka tentukan**

Dana Pembangunan Komunitas (Community Development Fund, CDF) adalah istilah untuk lembaga yang didirikan di negara Asia beberapa tahun ini, untuk menyalurkan pinjaman dan hibah bagi komunitas miskin. Dana ini berbeda-beda dan disesuaikan untuk merespon berbagai kebutuhan, kapasitas, dan konteks politik lokal (*Lihat Panduan Ringkas 5 mengenai Pendanaan Perumahan*). Beberapa dibentuk oleh pemerintah, LSM atau federasi komunitas, dengan pemerintah lokal sebagai mitra. Modal berasal dari donor, pemerintah, tabungan komunitas, dan lembaga keuangan. Persamaannya adalah sifatnya yang ringan, fleksibel, dan dikelola bersama oleh komunitas, pemerintah lokal, dan pemangku-kepentingan lainnya, serta berfungsi untuk memberi pinjaman untuk perumahan, infrastruktur, dan menciptakan mata pencaharian bagi organisasi komunitas. CDF bukanlah satu-satunya cara mendatangkan modal bagi komunitas miskin, namun pendekatan CDF memiliki beberapa keuntungan:

- 1 Uang “ditarik” dari sistem oleh kebutuhan, bukan “didorong” oleh agenda pembangunan eksternal.** Kebanyakan dana komunitas didirikan atas aset finansial dan organisasi yang diciptakan oleh simpan-pinjam komunitas, dan kebutuhan maupun proyek ditentukan oleh masyarakat: mereka yang bekerja dan mereka yang mengelola uang, bukan badan tertentu atau profesional atau LSM.
- 2 Cara ini lebih ringan, fleksibel, dan efisien untuk mencurahkan sumber daya pembangunan,** tanpa biaya peresmian dan administratif yang besar yang biasa menyertai proyek pembangunan konvensional. Saat komunitas terlibat mengelola kerja maupun dana, tercipta efisiensi dan sistem yang seimbang antara maksimalisasi keterampilan yang ada dan minimasi biaya.
- 3 Menjadi alat bagi peningkatan posisi keuangan maupun politis.** Dana dapat memperkuat inisiatif masyarakat dengan menempatkan sumber daya maupun kelembagaan pada sisi mereka saat bernegosiasi dengan pemerintah, dan menjadi proaktif menekan sistem di berbagai tingkatan demi perubahan yang mereka anggap perlu.
- 4 Terbangunnya transparansi dan akuntabilitas.** Penghalang besar pembangunan komunitas adalah bahwa masyarakat jarang tahu asal-usul dana: LSM dan badan donor memanfaatkan dananya, dan komunitas hanya menjadi penerima daripada menjadi peserta. Bila semua orang tahu benar asal dana, keseluruhan hubungan ini akan berubah. Keikutsertaan sesungguhnya berkuat pada masalah pengendalian uang. Bila komunitas dapat menggalang, menyimpan, dan mengelola dana dengan cara yang transparan dan akuntabel, mereka telah berdaya.
- 5 Keberlangsungan jangka panjang.** Pembangunan merupakan proses yang panjang, bukan proyek jangka pendek, dan perubahan memakan waktu. Karena modal mereka berputar dari satu pinjaman ke pinjaman lain, dana komunitas sesungguhnya merupakan mekanisme jangka panjang. Dana ini menjadi sumber daya bagi komunitas untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika hal itu makan waktu. Bandingkan dengan pendanaan proyek konvensional, dengan uang yang memiliki batasan waktu dan dengan cepat menghilang.

*Sumber: ACHR*

## Dana pembangunan komunitas di Thailand

**Community Organizations Development Institute (CODI)** didirikan tahun 2000, saat Kantor Pembangunan Komunitas Perkotaan disatukan dengan Dana Pembangunan Perdesaan. CODI merupakan dana pembangunan komunitas nasional yang mendukung komunitas miskin perkotaan maupun perdesaan di Thailand melalui beberapa cara. Sebagai entitas legal otonom, dengan status organisasi publik (di bawah Kementerian Pembangunan Sosial dan Ketahanan Manusia), CODI memiliki kebebasan lebih tinggi dibandingkan lembaga pemerintah konvensional.

CODI adalah lembaga yang mencoba menawarkan cara baru melakukan segala sesuatu dan mempromosikan perubahan skala besar – yang dilakukan masyarakat. Fokus CODI bukan hanya pada pengentasan kemiskinan, melainkan pada cara menjadikan komunitas sebagai aktor kunci dalam pembangunan apapun yang mereka inginkan. Bagian penting dari sistem kerja CODI adalah menciptakan ruang bagi komunitas untuk menentukan keputusan dan mengarahkan lembaga, sehingga CODI dapat memenuhi tujuannya sebagai lembaga publik yang dimiliki dan dikelola bersama oleh masyarakat.

Dua tahun pertama CODI dihabiskan berkonsentrasi pada upaya membangun

keterkaitan antar komunitas maupun jaringan komunitas (perdesaan dan perkotaan) dan mempromosikan mekanisme berbasis isu dan propinsi untuk pemecahan masalah yang diidentifikasi jaringan ini. Tahun ke tiga difokuskan pada upaya menjalin keterkaitan antara proses masyarakat yang telah diperkuat dengan berbagai kebijakan pemerintah. Hasilnya, beberapa program ditetapkan dan menunjukkan potensi keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan dan pembangunan di Thailand:

- Program Perbaikan berskala kota, Baan Mankong
- Perencanaan komunitas
- Kesejahteraan berbasis komunitas
- Pembentukan jaringan berbasis area maupun isu
- Pengelolaan sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan swakarsa komunitas

Sejak 2000 sekitar separuh dari semua komunitas perkotaan dan perdesaan telah terkait dengan proses CODI. Keterkaitan ini menyediakan mekanisme pembelajaran otomatis yang mencakup seluruh negeri, dan menawarkan berbagai kemungkinan bagi komunitas.

Sumber: [www.codi.or.th](http://www.codi.or.th)

### Dana nasional bagi komunitas miskin

*Bahan dasar penting dari kemampuan CODI mendukung semua inisiatif dan merespon cepat kebutuhan maupun peluang yang muncul dari jaringan adalah dana CODI. Modal pendanaan ini kini berkisar 77 juta US\$, kebanyakan berputar dalam empat bentuk pinjaman bagi organisasi komunitas (bukan komunitas secara individu): pinjaman untuk perumahan dan lahan, pinjaman untuk badan usaha komunitas, pinjaman untuk jaringan komunitas untuk pembangunan holistik, dan pinjaman dana berputar fleksibel untuk kelompok simpan-pinjam atau jaringan komunitas.*



PHOTO: CASE-THAILAND

# 10 cara mendukung organisasi komunitas:

- 1** Selalu cari keterlibatan aktif kaum miskin dan organisasi mereka dalam penyusunan kebijakan, rencana, program, atau proyek apapun yang memengaruhi mereka.
- 2** Selalu ingat bahwa kaum miskin perkotaan tak selalu sama. Kemiskinan perkotaan memengaruhi pria, wanita, anak-anak, remaja, dan lansia secara berbeda. Komunitas di daerah berbeda, dan masyarakat dalam satu komunitas mungkin memiliki kebutuhan, masalah, dan prioritas berbeda, dan hidup dalam tingkat kemiskinan berbeda.
- 3** Kenali organisasi komunitas miskin sebagai mitra yang sah dan berharga dalam mengembangkan solusi tahan lama bagi masalah lahan, perumahan, dan kemiskinan.
- 4** Libatkan organisasi komunitas sebagai aktor kunci dalam semua program sosial atau pembangunan yang mencakup perumahan, lahan, pemilikan lahan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
- 5** Fasilitasi inisiatif kolaboratif antara organisasi komunitas dan aktor kunci perkotaan lainnya seperti LSM, universitas, lembaga teknis, arsitek, kelompok masyarakat sipil, dan operator sektor swasta yang akan menjawab kebutuhan komunitas miskin.
- 6** Dukung terciptanya forum lokal, regional, dan nasional, dan lembaga perantara yang mempromosikan keterlibatan organisasi komunitas dengan pemangku-kepentingan lain dalam bidang kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi terkait perumahan.
- 7** Bantu organisasi komunitas untuk mengakses media massa seperti radio, televisi, dan internet, agar mereka memiliki cara baru untuk menyebarkan gagasan dan berita melampaui batas komunitas mereka sendiri, menuju daerah lain dan bagian masyarakat yang lain.
- 8** Ajak organisasi komunitas dan federasi maupun jaringan mereka dalam pengembangan dan penerapan program reformasi administrasi publik, sebagai cara mengajak pemerintah mengerti dan melayani dengan lebih baik kebutuhan kaum miskin.
- 9** Dukung dan ikut serta dalam kunjungan lapangan dan program pertukaran antara organisasi komunitas dan inisiatif naungan swakarsa komunitas di berbagai tempat. Kunjungan lapangan bersama yang memungkinkan pemimpin komunitas maupun pemerintah melihat dan belajar bersama dapat membangun kemitraan dan memperluas visi bersama.
- 10** Mulailah program orientasi untuk perwakilan terpilih dan pejabat pegawai negeri senior di tingkat nasional, provinsi, dan kota, yang akan membuat mereka berkontak langsung dengan kondisi kehidupan kaum miskin dan dengan pendekatan yang telah berhasil dilakukan kaum miskin untuk memperbaiki kondisi itu.

Sumber: Plummer, 2000

# Daftar Pustaka

## PUBLIKASI

- Asian Coalition for Housing Rights (ACHR), 2000, *Face to Face: Notes from the Network on Community Exchange*, the publication can be requested from ACHR website at [www.achr.net](http://www.achr.net).
- Anzorena, Eduardo Jorge S.J., 1996 (2nd edition), *Housing the Poor: The Asian Experience*, Pagtambayayong Foundation in Cebu, Philippines.
- Anzorena, Eduardo Jorge S.J. & Fernandez, Francisco L., 2004, *Housing the Poor in the New Millennium*, Pagtambayayong Foundation, Cebu, Philippines.
- Bigg T. & Satterthwaite, D (eds.), 2006, *How to Make Poverty History, The central role of local organizations in meeting the MDGs*, IIED, London.
- Cruz C & Satterthwaite D., 2005, *Building Homes, Changing Official Approaches: The Work of Urban Poor Organizations and their Federations and their Contributions to Meeting the Millennium Development Goals*, Poverty Reduction in Urban Areas Series Working Paper 16, IIED, May 2005.
- Gujit I & Kaul Shah M., 1998, *The Myth of Communitiy, Gender Issues in Participatory Development*, ITDG Publishing, London.
- Hasan, Arif, 1997, *Working with Government: The story of OPP's collaboration with state agencies for replicating its Low Cost Sanitation Program*, City Press, Karachi.
- Hasan, Arif (ed.), 2001, *Community Initiatives: Four Case Studies from Karachi*, City Press, Karachi.
- Hasan, Arif, 2001, *Working with Communities*, City Press, Karachi.
- International Institute for Environment and Development (IIED), 2001, *Civil Society in Action: Transforming Opportunities for the Urban Poor*, Special Issue of *Environment and Urbanization*, IIED, London, UK, Vol. 13, No. 1.
- Plummer, J., 2000, *Municipalities and Community Participation, A Sourcebook for Capacity Building*, Earthscan, London and Sterling VA.
- UNESCAP, 1996, *Living in Asian Cities: The impending crisis, causes, consequences and alternatives for the future*, Report of the Second Asia-Pacific Urban Forum, United Nations, New York, 1996.
- UN-HABITAT, 2003, *Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium?* Working Paper, Nairobi.
- UN-HABITAT, 2001, *Building bridges between citizens and local governments through managing conflict and differences Part I and II*, Nairobi.
- Asian Coalition for Housing Rights (ACHR). [www.achr.net](http://www.achr.net)

## SITUS WEB

Community Organizations Development Institute (CODI), Thailand. [www.codi.or.th](http://www.codi.or.th)

Environment and Urbanization, the Journal of the International Institute for Environment and Development (IIED), London, U.K. <http://sagepub.com/>

Orangi Pilot Project (OPP) [www.oppinstitutions.org](http://www.oppinstitutions.org)

Society for Promotion of Area Resource Centers (SPARC), India. [www.sparcindia.org](http://www.sparcindia.org)

Sevanatha NGO, Colombo, Sri Lanka. [www.sevanatha.org](http://www.sevanatha.org)

Slum / Shack Dwellers International (SDI). [www.sdinet.org](http://www.sdinet.org)

Urban Resource Centre Karachi. [www.urckarachi.org](http://www.urckarachi.org)

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

[www.unescap.org](http://www.unescap.org)

Housing the Urban Poor: A project of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). [www.housing-the-urban-poor.net](http://www.housing-the-urban-poor.net)

United Nations Human Settlements Programme. [www.unhabitat.org](http://www.unhabitat.org)

*Daftar situs web yang disarankan: Untuk daftar situs web yang dapat memberikan lebih banyak informasi tentang isu utama dalam seri Panduan Ringkas ini, mohon kunjungi situs web Perumahan bagi Kaum Miskin Kota (Housing the Urban Poor), dan ikuti link menuju "Organization database".*

[www.housing-the-urban-poor.net](http://www.housing-the-urban-poor.net)





PHOTO: USAID FIRE PROJECT

Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik yang makin pesat telah menghasilkan jumlah pengurusan kaum miskin kota yang terus meningkat. Seringkali mereka direalokasikan ke daerah pinggir yang jauh dari pusat pekerjaan dan peluang ekonomi. Pada saat yang bersamaan, terdapat lebih dari 500 juta orang yang tinggal di permukiman kumuh dan liar di Asia-Pasifik dan angka ini terus meningkat.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, pemerintah daerah membutuhkan instrumen kebijakan untuk mengamankan hak kaum miskin kota akan perumahan sehingga menghasilkan perbaikan kualitas hidup penduduk permukiman kumuh yang signifikan di tahun 2020. Tujuan dari Panduan Ringkas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pembuat kebijakan di tingkat nasional dan lokal akan bentuk kebijakan perumahan dan pembangunan kota yang berpihak pada kaum miskin dan mampu mengurangi kemiskinan kota.

Panduan Ringkas ini disiapkan dalam format yang mudah dibaca, dan disusun agar bisa mencakup rangkuman, tren dan kondisi, konsep, kebijakan, alat dan rekomendasi dalam menghadapi isu-isu yang terkait dengan perumahan berikut ini:

(1) **Urbanisasi**: Peran kaum miskin di dalam pembangunan kota (2) **Perumahan bagi MBR**: Memberi tempat yang layak bagi kaum miskin kota (3) **Ketersediaan Lahan**: Elemen penting dalam perumahan bagi kaum miskin kota (4) **Pengurusan**: Perlunya alternatif yang lebih berpihak pada kaum miskin (5) **Pembiayaan perumahan**: Cara untuk menolong kaum miskin untuk membayar perumahan (6) **Organisasi berbasis masyarakat**: Kaum miskin sebagai agen pembangunan (7) **Rumah Sewa**: Pilihan perumahan bagi kaum miskin yang sering terabaikan.

Panduan ringkas seri ini 6 membahas betapa berharga dan kayanya organisasi komunitas sebagai mitra dalam menemukan solusi alternatif bagi masalah perumahan mereka. Akan dibahas perkembangan organisasi komunitas di Asia, cara kerja, dan alat yang mereka gunakan, yang akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, terutama dalam konteks desentralisasi.

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs [www.housing-the-urban-poor.net](http://www.housing-the-urban-poor.net)

United Nations Human Settlements  
Programme (UN-HABITAT)  
P.O.Box 30030 GPO 00100  
Nairobi, Kenya  
Fax: (254-20) 7623092 (TCBB Office)  
E-mail: [tcbb@unhabitat.org](mailto:tcbb@unhabitat.org)  
Situs web: [www.unhabitat.org](http://www.unhabitat.org)

United Nations Economic and Social Commission  
for Asia and the Pacific (UNESCAP)  
Rajdamnern Nok Avenue  
Bangkok 10200, Thailand  
Fax: (66-2) 288 1056/1097  
Email: [escap-esdd-oc@un.org](mailto:escap-esdd-oc@un.org)  
Situs web: [www.unescap.org](http://www.unescap.org)